

**PENGARUH PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PEREKONOMIAN
DI INDONESIA
TAHUN 2007-2016
SKRIPSI**



Oleh:

Nama :Rendy Okryadi Putra

Nomor Mahasiswa :14313332

Program Studi :Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2018**

PENGARUH PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PEREKONOMIAN DI
INDONESIA
TAHUN 2007-2016

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1

Jurusan Ilmu Ekonomi,
pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama :Rendy Okryadi Putra

Nomor Mahasiswa :14313332

Program Studi :Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh – sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti yang dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman/ sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, Juli 2018

Penulis



Rendy Okryadi Putra

PENGESAHAN

Pengaruh Perbankan Syariah terhadap Perekonomian di Indonesia Tahun 2007 –
2016

Nama : Rendy Okryadi Putra
Nomor Mahasiswa : 14313332
Program Studi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 28 Juni 2018

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PEREKONOMIAN DI INDONESIA
TAHUN 2007-2016**

Disusun Oleh : **RENDY OKRYADI P.**

Nomor Mahasiswa : **14313332**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Kamis, tanggal: 9 Agustus 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D.

Penguji : Lak Lak Nazhat El Hasanah, SE., M.Si.



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur atas rahmat dan hidayah serta kemudahan yang diberikan oleh Allah S.W.T sehingga skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis.

Skripsi ini dipersembahkan penulis untuk :

1. Yang sangat saya hormati dan cintai Ayahanda Yusrizal, Ibunda Nellifda yang selalu mendo'akan, menyayangi, mendidik, memberikan motivasi dan dukungan dalam proses pengerjaan skripsi ini.
2. Kepada dosen pembimbing tugas akhir saya Bapak Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D. Terima kasih banyak karena penulis sudah dibantu, dibimbing, diajari dan penulis tidak akan lupa atas bantuan dan kesabaran bapak.
3. Teman satu rumah, satu atap, satu kontrakan dengan penulis Keluarga KKM7, Andry, Bagus, Haryo, Haris, Saeful, Ihsan yang selalu mendukung dan membantu selama ini. Terima kasih banyak atas bantuannya.
4. Terimakasih kepada Aisyah yang telah membantu, menyemangati dan mengajari penulis dalam proses penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak atas bantuannya.
5. Terimakasih banyak kepada Ramadhan Nanda yang telah membantu penulis dalam mencari sumber – sumber data penulis yang penulis teliti. Terima kasih banyak atas bantuannya.

6. Terimakasih banyak kepada Marzuki, Ivan, Bagas yang telah mengajari penulis bagaimana cara meregresi data. Terima kasih banyak atas bantuannya.
7. Kepada teman – teman penulis Arian, Putra, Eki yang telah memotivasi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih banyak atas motivasinya.
8. Kepada teman – teman penulis yang namanya tidak bisa di sebut satu – satu, mereka yang menyemangati penulis, motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih banyak atas dukungannya.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Puji Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat hidayah dan karunia-Nya. Shalawat beserta salam tak lupa penulis ucapkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi panutan dan junjungan mutlak bagi umat manusia.

Penulisan skripsi ini diselesaikan guna melengkapi tugas akhir Program S1 Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Adapun judul skripsi ini adalah “Pengaruh Perbankan Syariah Terhadap Perekonomian di Indonesia Tahun 2007-2016.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kesalahan, kekurangan maupun kekhilafan sehingga penulis mengharapkan koreksi yang membenarkan, kritik yang membangun dan saran yang baik demi kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D. selaku dosen pembimbing dengan kesabarannya telah banyak mengarahkan dan memberikan masukan-masukan serta nasehat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Akhsyim Afandi Drs.,MA.Ec.,Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D. selaku dosen pembimbing akademik.

5. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah memberikan dan mengajarkan ilmunya selama penulis menuntut ilmu pada almamater ini.
6. Kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai, yaitu bapak Yusrizal dan ibu Nellifda yang selalu memberikan doa, dukungan dan kasih sayang selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Semua teman – teman Ilmu Ekonomi 2014 yang mendukung baik di perkuliahan maupun diluar perkuliahan.

Penulis berharap semoga skripsi ini bisa berguna dan bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi almamater Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh .

Yogyakarta, 29 Juni 2018

Penulis

(Rendy Okryadi Putra)

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	ii
Halaman Pengesahan Skripsi	iii
Halaman Berita Acara Tugas Akhir	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Kata Pengantar	vii
Halaman Daftar Isi	ix
Halaman Daftar Tabel	xiii
Halaman Daftar Grafik.....	xv
Halaman Daftar Gambar	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	9
2.1. Kajian Pustaka.....	9
2.2. Landasan Teori.....	16
2.2.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi	16
2.2.2. Teori Aset Perbankan Syariah.....	16
2.2.2.1. Hubungan Total Aset Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	17
2.2.3. Teori Pembiayaan Perbankan Syariah	17

2.2.3.1. Hubungan Pembiayaan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	18
2.2.4. Teori Dana Pihak Ketiga (DPK)	19
2.2.4.1. Hubungan DPK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	19
2.2.5. Teori Kredit	20
2.2.5.1. Hubungan Kredit Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	20
2.2.6. Nilai APBD	21
2.2.6.1. Hubungan Nilai APBD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	22
2.3. Kerangka Pemikiran	23
2.4. Hipotesis	24
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1. Jenis dan Sumber Data	25
3.2. Variabel Penelitian	26
3.2.1. Variabel Dependen	26
3.2.2. Variabel Independen	26
3.3. Metode Analisis	27
3.3.1. Metode Estimasi Data Panel	28
3.3.2. Pemilihan Model Estimasi	29
3.3.3. Uji Statistik	31
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	33
4.1. Analisis Deskripsi Data	33
4.2. Deskripsi Objek Penelitian	33
4.2.1. Pertumbuhan Ekonomi	33
4.2.2. Total Aset	37

4.2.3. Pembiayaan	40
4.2.4. DPK.....	43
4.2.5. Kredit Konvensional	46
4.2.6. Nilai APBD	49
4.3. Hasil Model Estimasi Data Panel.....	52
4.3.1. Uji <i>Chow Test</i>	52
4.3.2. Uji <i>Hausman Test</i>	53
4.3.3. Hasil Estimasi Fixed Effect Model	54
4.3.4. Koefisien Determinasi (R^2).....	56
4.3.5. Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	57
4.3.6. Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji T)	57
4.3.7. Persamaan Estimasi Dengan Intersep Pembeda <i>Cross Effect</i>	60
4.4. Analisis Ekonomi	68
4.4.1. Analisis Pengaruh Total Aset Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.....	68
4.4.2. Analisis Pengaruh Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.....	68
4.4.3. Analisis Pengaruh DPK Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia	69
4.4.4. Analisis Pengaruh Kredit Konvensional Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.....	70
4.4.5. Analisis Pengaruh Nilai APBD Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.....	70
BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI	72
5.1. Kesimpulan	72

5.2. Implikasi.....	74
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2007-2011 (Miliar)	34
Tabel 4.2. Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2012-2016 (Miliar)	35
Tabel 4.3. Total Aset Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2007-2011 (Miliar)	37
Tabel 4.4. Total Aset Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2012-2016 (Miliar)	39
Tabel 4.5. Total Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2007-2011 (Miliar)	40
Tabel 4.6. Total Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2012-2016 (Miliar)	42
Tabel 4.7. Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2007-2016 (Miliar)	44
Tabel 4.8. Kredit Bank Umum Konvensional di Indonesia Tahun 2007-2011 (Miliar)	47
Tabel 4.8. Kredit Bank Umum Konvensional di Indonesia Tahun 2012-2016 (Miliar)	48
Tabel 4.9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Indonesia Tahun 2007-2011 (Miliar)	50
Tabel 4.9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Indonesia Tahun 2012-2016 (Miliar)	51
Tabel 4.10. Hasil Regresi Uji <i>Chow Test</i>	53
Tabel 4.11. Hasil Regresi Uji <i>Hausman Test</i>	54
Tabel 4.12. Hasil Regresi <i>Fixed Effect Model</i>	54

Tabel 4.13. Hasil Regresi Pengujian Hipotesis 57

Tabel 4.14. Nilai Crossid Provinsi 60

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.2. Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2007-2016	4
--	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran.....	23
-------------------------------------	----

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar peran perbankan syariah bagi pertumbuhan ekonomi. Tingginya perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang harus diimbangi dengan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi latar belakang penulisan penelitian ini. Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode estimasi data panel, Uji *Chow test*, Uji *Hausman test*, dan Uji Statistik untuk mengetahui berapa besar pengaruh perbankan syariah bagi pertumbuhan ekonomi yang direpresentasikan dengan Pertumbuhan Ekonomi diwujudkan dalam bentuk PDRB (ADHK). Hasil uji model regresi menemukan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel total aset, pembiayaan perbankan syariah, kredit konvensional dan nilai APBD signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel total aset perbankan syariah, total pembiayaan perbankan syariah, DPK perbankan syariah, kredit konvensional dan nilai APBD mampu menjelaskan pengaruhnya sebesar 96% terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti bahwa variabel tersebut memiliki peran yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Solusi yang diberikan adalah perbankan syariah harus memperthankan dan meningkatkan *market share*, memperkuat regulasi, meningkatkan porsi pembiayaan, meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya serta mengadaptasi kemajuan teknologi.

Kata Kunci : *Pertumbuhan ekonomi, Perbankan Syariah, Perbankan Konvensional, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Bank Syariah yang ada di Indonesia terbagi atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) semuanya berada dibawah naungan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain Undang-Undang tersebut, perbankan syariah di Indonesia juga diatur dalam UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga

Syariah Negara (SBSN), UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama untuk Ekonomi Syariah, UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Adanya aspek hukum dan perundang-undangan yang mengatur menjadikan pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Sektor Keuangan Syariah semakin berkembang pesat karena telah memiliki landasan dan kepastian hukum yang jelas.

Pada tahun 1991 lahir Bank Umum pertama yang menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan operasionalnya. Berdirinya bank syariah didukung oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia. Bank Syariah mulai beroperasi pada tahun 1992, yang didukung oleh para cendekiawan muslim dan pengusaha serta masyarakat luas. Dengan produk pendanaan yang ada menggunakan prinsip *Wadiah* (titipan) dan *Mudharabah* (bagi hasil). Sedangkan untuk penanaman dana menggunakan prinsip jual beli, bagi hasil, dan sewa.

Sistem perbankan di Indonesia pada saat ini menggunakan *dual banking system*. Yang dimaksud dengan *dual banking system* adalah suatu negara yang menganut dua sistem perbankan, dengan kata lain sistem banknya menerapkan perlakuan pengawasan yang sama terhadap bank umum yang beroperasi dengan sistem bunga dan bank yang beroperasi dengan sistem syariah. (Warjiyo, 2016). Dua hal tersebut menjadi dasar perbedaan yang diketahui oleh masyarakat umum. Dalam perkembangannya, kemajuan perbankan konvensional lebih eksis dibandingkan dengan perbankan syariah karena keberadaan bank konvensional yang ada lebih dulu dan juga mempunyai lebih banyak kantor cabang dibandingkan dengan bank syariah. Kebangkitan perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1990-an yang ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat. Kehadiran bank tersebut diikuti dengan kehadiran lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. Adanya krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 membuat kepercayaan terhadap bank konvensional semakin melemah, namun perbankan syariah memiliki kinerja yang tetap baik saat perbankan konvensional dilanda krisis kepercayaan dan krisis likuiditas.

Keberadaan bank syariah didukung dengan keluarnya Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang perbankan dengan sistem bagi hasil diakomodasi. Kemudian pada tahun 1998 munculah RUU nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan yang memberikan peluang besar bagi pengembangan perbankan syariah. Pada tahun 2008 perbankan syariah semakin eksistensi dan mendapat perhatian dari pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 pasal 3 tentang Perbankan Syariah bertujuan menunjang

pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan selama 10 tahun terakhir, dari tahun 2007 – 2016 Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan BPRS mengalami peningkatan yang konstan. Jumlah Bank Umum Syariah mengalami peningkatan yang konstan. Pada tahun 2007 jumlah Bank umum syariah ada 3 unit lalu mengalami peningkatan sebesar 10 unit hingga tahun 2017. Peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2009 ke 2010 yaitu sebesar 5 unit. Lalu pada tahun 2011-2017 jumlah bank umum syariah mengalami kenaikan sebanyak 1 unit pada tahun 2014 dan tahun 2016. Pada unit usaha syariah terlihat bahwa jumlah UUS berfluktuasi. Terdapat peningkatan dari tahun 2007-2008, akan tetapi mengalami penurunan pada tahun selanjutnya. Perkembangan UUS di tahun berikutnya tidak terlalu bagus, berdasarkan grafik di atas UUS terus mengalami penurunan dari tahun 2011-2017. Sementara itu BPRS dari 2007-2017 memiliki trend yang bagus. Terlihat bahwa tiap tahunnya mengalami peningkatan yang besar dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan penjelasan grafik di atas selama 10 tahun terakhir, dapat membuktikan bahwa bank syariah memiliki eksistensi yang terus meningkat. Hal tersebut membuktikan bahwa perbankan syariah sudah mampu bersaing dengan perbankan konvensional. Namun pesatnya pertumbuhan dan ketatnya persaingan dunia perbankan di Indonesia maka perbankan syariah harus tetap meningkatkan kinerjanya serta berinovasi terhadap produk perbankan syariah, sehingga para nasabah dan investor tertarik untuk berinvestasi. Selain itu perbankan syariah juga harus

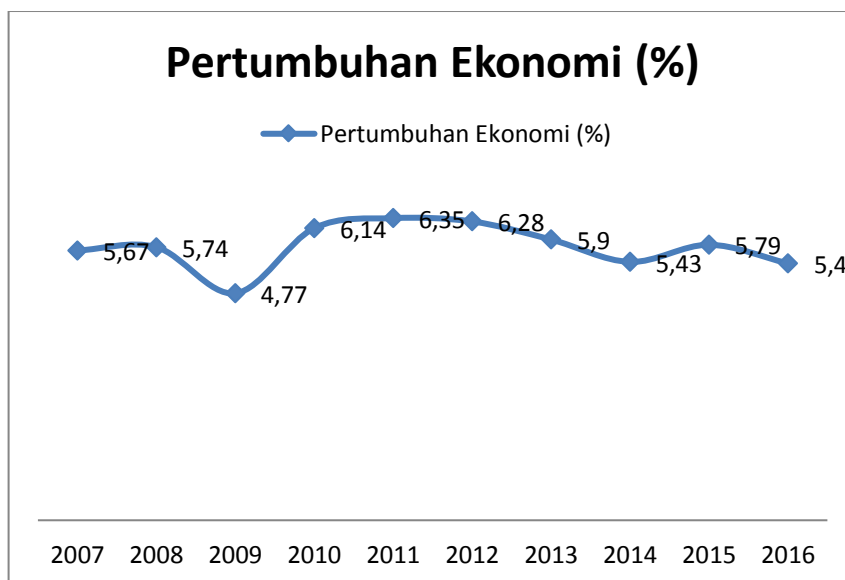
menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian sebagaimana yang telah di sampaikan oleh Bank Indonesia agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Menurut Saputri (2016) pertumbuhan ekonomi ditandai dengan peningkatan total output dalam suatu perekonomian. Struktur kajian perekonomian di Indonesia didominasi oleh pulau Jawa. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perekonomian suatu negara dalam menghasilkan output selama periode tertentu.

Berikut ini grafik yang menunjukkan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia tahun 2007 – 2016 berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) :

Grafik 1.2

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2007 – 2016



Sumber : *Badan Pusat Statistik (BPS) 2018*

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia berfluktuasi, yang mana pada tahun 2007 total pertumbuhan ekonomi sebesar 5,67% mengalami peningkatan pada tahun 2008 sebesar 5,74% . Terealisasinya dengan baik instrumen-instrumen yang mempengaruhi ekonomi tumbuh dengan baik, namun pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan menjadi 4,77% hal ini disebabkan karena dampak dari gejolak politik yang terjadi pada tahun 2008, selain itu juga dipengaruhi oleh kasus Bank Century. Di tahun 2010 ekonomi tumbuh dengan baik sebesar 6,14% dan terus mengalami trend positif sampai akhir tahun 2012 sebesar 6,28%, peningkatan ini dipengaruhi oleh investasi yang meningkat, ekspor barang juga meningkat, konsumsi rumah tangga naik, konsumsi pemerintah naik dan impor dari luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu juga dipengaruhi oleh peningkatan kinerja industri dan struktur lapangan usaha. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2013 hanya sedikit mengalami peningkatan dan cenderung merata sampai akhir tahun 2016 sebesar 5,4% hal ini disebabkan oleh konsumsi rumah tangga yang tetap kuat dan didukung oleh inflasi yang terkendali dan sejalan berlanjutnya pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Modal memegang peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut teori pertumbuhan Adam Smith akumulasi modal akan menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Modal tersebut diperoleh dari simpanan yang dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito ataupun giro. Dengan mengakumulasikan modal yang berupa simpanan dari masyarakat, maka para pelaku ekonomi dapat menginvestasikannya

ke sektor riil, dengan upaya untuk meningkatkan pendapatan. Perbankan berkontribusi dalam penyediaan modal melalui penyaluran pembiayaan kepada pelaku ekonomi. Sektor perbankan akan mendorong perekonomian suatu negara karena bank sangat diperlukan untuk pembiayaan dalam pembangunan ekonomi. Sehingga bank dapat dikatakan sebagai jantung dari perekonomian suatu negara. Perkembangan perbankan menjadi tolak ukur keberhasilan suatu negara karena semakin banyak sektor perbankan tumbuh maka semakin banyak pula sumber pembiayaan yang dapat dialokasikan ke sektor-sektor produktif. Sehingga kontribusi perbankan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

1.2.Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas diketahui bahwa pertumbuhan perbankan syariah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kemudian penulis ingin mengetahui seberapa besar pengaruh variabel Aset, Pembiayaan, DPK, Nilai APBD dan Kredit Konvensional terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2007 – 2016 serta adanya hasil yang berbeda dalam penelitian terdahulu menjadi alasan penulis untuk menguji kembali pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka muncul pertanyaan dari penelitian ini yang perlu dibahas, yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh variabel Asset terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia ?
2. Bagaimana pengaruh variabel Pembiayaan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia ?
3. Bagaimana pengaruh variabel DPK terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia ?
4. Bagaimana pengaruh variabel Kredit Konvensional terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia ?
5. Bagaimana pengaruh variabel Nilai APBD terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia ?

1.3.Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan penelitian

1. Menganalisis pengaruh asset perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh pembiayaan perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
4. Menganalisis pengaruh kredit konvensional di perbankan konvensional terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
5. Menganalisis pengaruh nilai APBD terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

1.3.2. Manfaat penelitian

1. Untuk akademisi dan praktisi ekonomi, penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam memajukan pertumbuhan ekonomi.
2. Bagi peneliti, ini bermanfaat sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dan juga bahan untuk menambah wawasan dan pengetahuan agar dalam penelitian dimasa yang akan datang dapat berhati-hati dalam menentukan atau mengambil keputusan dan juga dapat dijadikan pertimbangan dari permasalahan penelitian yang ada.
3. Penelitian ini juga bermanfaat untuk masyarakat umum, yang tujuannya untuk memberikan informasi tentang seberapa besar pertumbuhan ekonomi di Indonesia serta menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tersebut sehingga masyarakat lebih bagaimana ekonomi itu dapat tumbuh dan menambah kesadaran masyarakat dalam menjalankan usaha karena masyarakat adalah faktor penting dalam penunjang meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hayati (2014), tentang Peran Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, menyatakan bahwa kehadiran lembaga keuangan syariah dan lembaga sosial berbasis syariah seharusnya semakin mewujudkan ke maslahatan dan keadilan sosial sebagaimana yang menjadi tujuan ekonomi syariah. Mungkinkah perbankan syariah menjadi jawaban dari persoalan-persoalan pembangunan di Indonesia? Berapa besar peran perbankan syariah bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Perbankan syariah telah memberikan pengaruh signifikan pada praktik keuangan syariah lainnya, seperti asuransi syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, perusahaan pembiayaan syariah, dan pasar modal syariah. Berkembangnya perbankan syariah dan sektor keuangan syariah lainnya, telah membentuk sistem ganda ekonomi di Indonesia yaitu ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Perkembangan perbankan syariah hingga bulan Oktober 2012 cukup mengembirakan. Aset perbankan syariah mampu berkembang $\pm 37\%$ sehingga total asetnya mencapai Rp 179,09 triliun. Begitu pula dengan pembiayaan perbankan syariah jumlahnya mencapai Rp 135,58 triliun (40,06%, *yoy*) dan penghimpun dana menjadi Rp 134,45 triliun (32,06%). Penelitian ini menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS) untuk mengukur parameter. Hasil akhir uji model regresi menemukan bahwa total aset perbankan syariah

tidak berpengaruh signifikan terhadap PDB sedangkan total pembiayaan perbankan syariah berpengaruh signifikan terhadap PDB. Variabel total aset dan total pembiayaan bank syariah mampu menjelaskan pengaruh sebesar 33,8% terhadap PDB. Hal ini berarti bahwa peran perbankan syariah bagi pertumbuhan ekonomi relatif masih kecil.

El Ayyubi (2017), tentang Pengaruh Bank Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia, menyatakan bahwa sektor keuangan memegang peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kausalitas antara perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, menganalisis respon pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada saat terjadi guncangan pada variabel perbankan syariah, dan mengetahui kontribusi variabel perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode *Vector Error Corection Model* (VECM) untuk melihat pengaruh dalam jangka panjang dan respon terhadap guncangan yang terjadi pada variabel yang diteliti, menggunakan data dari bulan Januari 2010 hingga bulan Desember 2016. Hasil penelitian diperoleh adalah adanya bidirectional causality antara pembiayaan syariah dan GDP. Pada hasil estimasi VECM menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara perbankan syariah dan pertumbuhan ekonomi. Pada hasil IRF respon pertumbuhan ekonomi mengalami respon yang berbeda terhadap guncangan pembiayaan syariah dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Berdasarkan hasil FEVD terlihat bahwa pembiayaan pada perbankan syariah memiliki kontribusi paling besar dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi namun tidak pada DPK.

Oleh karena itu, perbankan syariah harus lebih efisien dalam melakukan penyaluran DPK pada pembiayaan.

Andriansyah (2009), tentang Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia dan Kontribusinya bagi Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa secara umum menunjukkan bahwa pengembangan perbankan syariah di Indonesia telah didukung oleh pranata hukum yang memadai baik dari aspek legalitas hukum nasional, hukum islam, maupun dukungan peraturan pendukung operasionalnya. Analisa terhadap data juga menunjukkan bahwa perbankan syariah telah menjukan kinerja yang menggembirakan meskipun perannya masih perlu untuk dikembangkan. Perbankan syariah juga telah memberikan kontribusi penting bagi pembangunan nasional dengan melaksanakan fungsi intermediasi keuangan dan menjaga stabilitas keuangan nasional.

Armein (2011), tentang Pengaruh Perbankan Syariah Yang Diwakilkan Oleh Aset, Dana Pihak Ketiga Dan Pembiayaan Pada Pertumbuhan Perekonomian Indonesia, menyatakan bahwa kemampuan perbankan syariah dalam bertahan menghadapi krisis perekonomian Indonesia di tahun 1997 – 1998 telah terbukti. Semenjak itu pertumbuhan perbankan syariah mengalami kenaikan yang sangat pesat. Secara umum, perkembangan jumlah aset, dana pihak ketiga dan pembiayaan pada bank syariah terus mengalami peningkatan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kontribusi tiga indikator perbankan syariah yaitu aset syariah, dana pihak ketiga syariah dan pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini merupakan studi kasus di Indonesia dengan menggunakan data sekunder dari tahun 1992 sampai dengan tahun 2010 yang diperoleh dari

berbagai laporan terbitan dari Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS). Analisa Regresi Berganda digunakan dalam penelitian ini untuk mengestimasi tiga indikator perbankan syariah yaitu aset syariah, dana pihak ketiga syariah dan pembiayaan syariah, yang merupakan ukuran untuk perkembangan perbankan syariah, laju pertumbuhan ekonomi harga konstan 2000 untuk pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian terhadap tiga indikator perbankan syariah yaitu aset, dana pihak ketiga, dan pembiayaan terhadap laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa hanya variabel aset dan pembiayaan yang berpengaruh signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Variabel aset mempunyai pengaruh negatif sedangkan pembiayaan berpengaruh positif.

Deviani (2016), tentang Analisis Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pendidikan, menyatakan bahwa desentralisasi bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan mengelola keuangan daerahnya secara efisien dan efektif sehingga tujuan desentralisasi maupun tujuan daerah yang telah ditetapkan seperti pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendidikan yang semakin baik dapat dicapai. Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen penting yang mengundang perhatian publik. Hal ini disebabkan karena masyarakat sebagai pemberi dana publik melalui pajak daerah yang mereka bayarkan berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan dengan semestinya, efisien, efektif dan berorientasi pada kepentingan publik. Belanja daerah mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dan arah pembangunan daerah, maka itu analisis terhadap

belanja seharusnya dilakukan untuk dijadikan dasar evaluasi dan koreksi. Belanja yang dilakukan pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Penelitian ini menggunakan data time series dengan menggunakan metode Statistik deskriptif, Uji Asumsi Klasik. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa ratio belanja terhadap PDRB berpengaruh negatif pada pertumbuhan ekonomi. Tingkat signifikansi pengaruh ratio belanja terhadap PDRB lebih tinggi dari ratio pertumbuhan belanja modal dengan bentuk pengaruhnya positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini berarti semakin tinggi ratio belanja terhadap PDRB akan mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi. Ratio belanja terhadap PDRB menggambarkan produktifitas dan efektifitas daerah dalam membelanjakan anggarannya, semakin rendah rasionya berarti semakin efektif pemerintah dalam membelanjakan anggarannya karena ratio belanja terhadap PDRB merupakan perbandingan antara jumlah realisasi belanja daerah tersebut dengan pendapatan domestik regional bruto daerah tersebut.

Fithriyah (2010), tentang Pengaruh Kredit Perbankan Terhadap Pertumbuhan Industri Manufaktur Dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, menyatakan angka pertumbuhan kredit perbankan pada sektor industri manufaktur dari tahun 2004 – 2008 perubahannya bersifat fluktuatif. Kredit perbankan yang diberikan oleh bank – bank umum pada sektor industri manufaktur setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan kredit yang di pinjam oleh industri manufaktur. Pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menggambarkan terjadinya kemajuan atau perkembangan ekonomi dalam suatu negara berdasarkan periode dan waktu yang

telah ditentukan. Dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linear membuktikan bahwa kredit perbankan secara serentak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Muliansyah (2012), tentang Hubungan Dana Pihak Ketiga (DPK) di Perbankan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia, menyatakan Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk terbesar ke-4 di dunia berdasarkan data BPS tahun 2010. Di satu sisi jumlah penduduk yang besar memberikan potensi konsumsi masyarakat dan faktor produksi tenaga kerja menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, disisi lain permasalahan yang dihadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia adalah kurangnya modal pembiayaan pertumbuhan ekonomi yang digunakan untuk mendorong perekonomian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Permanent Income Hypothesis* (PIH). Model yang digunakan Vector Autoregressive (VAR). Secara umum hubungan simpanan masyarakat (DPK) pada prospek pendapatan pada ketiga periode penelitian menunjukkan hubungan yang tidak signifikan, sebaliknya hubungan antara pendapatan (Pertumbuhan Ekonomi) terhadap DPK menunjukkan hasil yang negatif dan signifikan.

Pujiati (2008), tentang Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal, menyatakan desentralisasi fiskal tidak akan berguna jika tidak diikuti dengan kemampuan finansial yang cukup memadai oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu melalui UU No. 33/2004, diharapkan nantinya akan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Sumber penerimaan daerah

yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah menurut UU No. 33/2004 dalam pelaksanaan desentralisasi meliputi :

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), pinjaman daerah dan lain – lain penerimaan yang sah. Dalam penelitian ini menggunakan metode GLS (*Generalized Least Squares*). Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tanda positif dan signifikan secara statistik pada derajat kepercayaan 1 persen untuk semua kabupaten/kota. Dana Bagi Hasil (DBH) menunjukkan tanda yang positif dan signifikan secara positif pada derajat kepercayaan 1 persen untuk semua kabupaten/kota. Dana Alokasi Umum (DAU) menunjukkan tanda yang negatif dan signifikan secara statistik pada derajat kepercayaan 1 persen untuk semua kabupaten/kota.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2013) pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor – faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang modal. Teknologi yang digunakan berkembang. Disamping itu tenaga kerja bertambah sebagai perkembangan penduduk, dan pengalaman kerja dan pendidikan menambah keterampilan mereka.

2.2.2. Teori Aset Perbankan Syariah

Menurut Faud (2016) aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh perbankan/pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lain dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh perbankan, pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non – keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber – sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Untuk mengukur seberapa besar tingkat aset dilihat dari kas dicatat sebesar nilai nominal, investasi jangka

pendek, piutang dicatat sebesar nilai nominal, dan persediaan biaya. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan, termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

2.2.2.1. Hubungan Total Aset Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu negara menunjukkan kemampuan masyarakat untuk memperoleh tambahan pendapatan pada waktu tertentu, yaitu dengan dengan meningkatkan produktivitas kerja dan tambahan modal. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dibutuhkan lembaga – lembaga keuangan yang mampu memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan aset – aset keuangan. Dengan banyaknya aset – aset keuangan maka akan dengan mudah untuk melakukan segala pemodalannya terhadap masyarakat sehingga akan terciptanya pertumbuhan ekonomi yang bagus. Dalam suatu sistem perekonomian peran lembaga keuangan sebagai menjalankan fungsi intermediasi. Dengan banyaknya aset – aset perbankan akan mendorong inovasi teknologi dan pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran modal ke sektor produktif sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan demikian banyaknya aset – aset perbankan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.2.3. Teori Pembiayaan Perbankan Syariah

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014) mendefinisikan pembiayaan pada dasarnya merupakan sebuah kesepakatan bank dengan nasabah yang memerlukan dana untuk membiayai kegiatan atau aktivitas tertentu. Kesepakatan penyaluran pembiayaan bank kepada nasabah tersebut dapat dibedakan berdasarkan akad

yang digunakan. Akad pembiayaan bisa berupa akad jual beli, akad penanaman modal atau investasi, akad sewa – menyewa, dan akad lain – lain. Ada pula akad pinjam – meminjam uang tanpa tambahan atas pokok atau bunga. Pengenaan tambahan pengembalian berupa bunga pada pokok pinjaman terjadi pada kredit konvensional. Pada bank syariah, tambahan pengembalian berupa bunga pinjaman tidak terjadi. Inilah yang menjadi pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional. Bank syariah tidak menjadikan bunga sebagai instrumen operasional bisnis. Pengenaan bunga pada pinjaman sama artinya dengan riba, dan hal itu tidak diperkenankan secara syariah.

2.2.3.1. Hubungan Pembiayaan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Penyaluran pembiayaan merupakan seberapa besar pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada masyarakat dengan imbalan berupa margin, bagi hasil atau ujah. Pembiayaan bank syariah secara garis besar terbagi dua yaitu pembiayaan disektor produktif dan pembiayaan disektor konsumtif seperti investasi dan pembiayaan modal kerja. Dengan menyediakan modal melalui penyaluran pembiayaan bagi pelaku ekonomi maka akan menunjang perekonomian suatu negara karena diperlukan untuk membiayai pembangunan ekonomi. Ketika sektor perbankan tumbuh pesat maka semakin banyak sumber pembiayaan yang dapat dialokasikan ke sektor – sektor produktif, sehingga pembiayaan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.2.4. Teori Dana Pihak Ketiga (DPK)

Menurut Hasyim (2016) dana pihak ketiga berdasarkan Pasal 1 No. 20 Undang – undang No. 21 Tahun 2008, dana pihak ketiga merupakan dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam dunia perbankan, dana pihak ketiga terdiri dari simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*), dan simpanan deposito (*time deposit*). Menurut Bank Indonesia dana pihak ketiga merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat baik perorangan, kelompok dan lembaga badan hukum dalam bentuk giro wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah.

2.2.4.1. Hubungan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mengukur kinerja bank syariah sebagai lembaga intermediasi, bisa dengan cara melihat kemampuan bank tersebut dalam menghimpun dana pihak ketiga (DPK) dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dana pihak ketiga terdiri dari tabungan mudharabah, deposito mudharabah dengan berbagai termin. Semakin banyak DPK yang berhasil dihimpun, diduga semakin memberi kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin banyak nasabah menyimpan dana, maka semakin banyak pula transaksi keuangan di bank syariah yang tercatat dalam PDRB. Dana pihak ketiga secara positif berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

2.2.5. Teori Kredit

Menurut Kasmir (2014) kredit dalam arti luas sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam bahasa latin kredit berarti *credere* artinya percaya. Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah dia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan kembali sesuai dengan penyerahan barang di belakang, dan *qard* (pinjaman), serta kombinasi dari akad – akad tersebut. Menurut Undang – Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing – masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Dengan demikian pula dengan masalah sanksi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

2.2.5.1. Hubungan Kredit Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Tinggi dan rendahnya kredit perbankan akan dipengaruhi oleh tingkat suku bunga perbankan, jika suku bunga turun permintaan terhadap kredit meningkat dan sebaliknya, jika suku bunga tinggi permintaan terhadap kredit menurun (*ceteris paribus*). Kenaikan permintaan kredit perbankan akan mendorong investasi, dan pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Dengan demikian, banyaknya kredit perbankan itu akan mendorong pertumbuhan investasi yang mana pertumbuhan investasi ditentukan

oleh pertumbuhan kredit sehingga kredit berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.2.6. Teori Nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

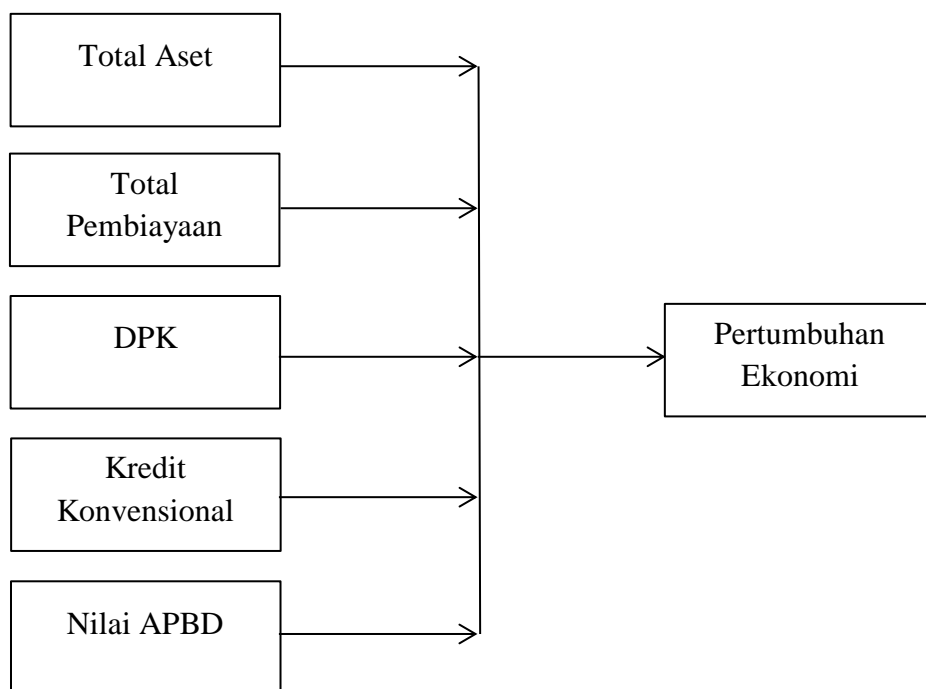
Menurut Koto (2012) merupakan instrumen utama untuk melaksanakan kebijakan dalam satu tahun anggaran. Perbedaan substansial antara era sebelum otonomi dengan era otonomi daerah, bahwa sebelumnya dominasi eksekutif sangat besar dan hampir menafsirkan peran DPRD dan masyarakat dalam menyusun APBD, berubah kepada penyusunan anggaran yang harus mengedepankan partisipasi dan akuntabilitas publik. Dengan demikian penyusunan harus melibatkan masyarakat secara aktif. Untuk itu perlu dibuat regulasi antara ketiga pihak agar hak dan kewajibannya jelas, karena APBD merupakan operasionalisasi dari berbagai kebijakan yang ditetapkan, maka harus mencerminkan suatu kesatuan sistem perencanaan yang sistematis dan dapat dianalisis dengan dokumen – dokumen perencanaan yang ditetapkan sebelumnya. Dari sisi aturan, mekanisme penyusunan anggaran khususnya APBD diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006. Aturan ini kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya (Permendagri) Nomor 59 tahun 2007 menyatakan tentang pengelolaan keuangan daerah. Undang – Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang merupakan revisi dari Undang – Undang nomor 22 tahun 1999. Dari berbagai peraturan perundang – undangan tersebut pada prinsipnya penyusunan APBN haruslah mengedepankan prinsip – prinsip *good governance*, misalnya akuntabilitas, transparansi, responsifitas, efektif, efisien, dan partisipatif.

2.2.6.1 Hubungan Nilai APBD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Nilai APBD yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran belanja daerah. Sumber – sumber penerimaan daerah yaitu pendapatan asli daerah, dana berimbang, dan penerimaan lain – lain yang sah. Sumber pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah atau sumber daya alam. APBD diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Secara umum dikategorikan dikategorikan kedalam pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Dikelolanya APBD oleh masing – masing pemerintah daerah tanpa campur tangan pemerintah pusat dalam rangka perwujudan otonomi daerah untuk mensejahterakan rakyat didaerahnya sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi semakin tinggi ratio belanja terhadap PDRB akan mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi. Ratio belanja terhadap PDRB menggambarkan produktifitas dan efektifitas daerah dalam membelanjakan anggarannya, semakin rendah rasionya berarti semakin efektif pemerintah dalam membelanjakan anggarannya karena ratio belanja terhadap PDRB merupakan perbandingan antara jumlah realisasi belanja daerah tersebut dengan pendapatan domestik regional bruto daerah tersebut. Dengan demikian nilai APBD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan rangkuman dari seluruh dasar – dasar teori yang ada dalam penelitian ini, dimana dalam kerangka pemikiran ini menggambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis

Hipotesis yaitu jawaban yang mempunyai sifat sementara terhadap masalah pada penelitian sampai terbukti akurat dengan melalui pengumpulan data dan disertai dengan pengolahan data. Dalam penelitian ini, analisis menggunakan asumsi – asumsi sebagai berikut :

1. Total aset berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2007 – 2016.
2. Total pembiayaan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2007 – 2016.
3. Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2007 – 2016.
4. Kredit konvensional berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2007 – 2016.
5. Nilai APBD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2007 – 2016.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data yang bersifat kuantitatif. Data yang pada dasarnya menghasilkan hasil analisis angka – angka yang diolah dengan menggunakan metode statistik yang menghasilkan hubungan antara variabel yang diteliti. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode data panel yakni gabungan antara data *time series* dan *cross section*. Adapun data *time series* yang digunakan adalah data tahunan yakni 2007 – 2016 dan data *cross section* yakni sebanyak 33 Provinsi di Indonesia diantaranya Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua.

Pengumpulan data pada penelitian ini bersumber dari :

- Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Bank Indonesia.
- Otoritas Jasa Keuangan.

- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.
- Sumber – sumber lainya yang terkait dan mendukung penelitian ini.

3.2. Variabel Penelitian

3.2.1. Variabel dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data pertumbuhan ekonomi yang diwujudkan dalam bentuk PDRB (ADHK) di Indonesia tahun 2007 – 2016 yakni sebanyak 33 Provinsi di Indonesia diantaranya Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua (dalam satuan miliar).

3.2.2. Variabel Independen

Variabel indenpenden merupakan variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain (dependen). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Total aset perbankan syariah (X1) adalah data jumlah aset perbankan syariah per Provinsi yang ada di Indonesia tahun 2007 – 2016 dengan menggunakan satuan miliar.

2. Total pembiayaan perbankan syariah (X2) adalah pembiayaan perbankan syariah per Provinsi yang ada di Indonesia tahun 2007 – 2016 dengan menggunakan satuan miliar.
3. Total dana pihak ketiga (X3) adalah data jumlah dana pihak ketiga perbankan syariah per Provinsi yang ada di Indonesia tahun 2007 – 2016 dengan menggunakan satuan miliar.
4. Total kredit konvensional (X4) adalah data jumlah kredit perbankan konvensional per Provinsi yang ada di Indonesia tahun 2007 – 2016 dengan menggunakan satuan miliar.
5. Total nilai APBD (X5) adalah data nilai anggaran pendapatan belanja daerah per provinsi yang ada di Indonesia tahun 2007 – 2016 dengan satuan miliar.

3.3. Metode Analisis

Dalam penelitian ini menggunakan metode data analisis deskriptif dan kuantitatif, yaitu mendeskripsikan suatu permasalahan dengan menganalisis data yang berbentuk angka – angka dengan rumus – rumus perhitungan yang digunakan dalam menganalisis permasalahan pada penelitian ini. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah data panel dengan pengolahan datanya menggunakan program *Eviews 8*. Data panel merupakan gabungan antara data silang (*cross section*) dengan data runtut waktu (*time series*) pada awalnya diperkenalkan oleh Howles sekitar tahun 1950. (Sriyana, 2014).

3.3.1. Metode estimasi data panel

Analisis data yang dilakukan menggunakan metode *Ordinary Least Square*, dengan fungsi Pertumbuhan Ekonomi = f(Aset, Pembiayaan, DPK, Kredit Konvensional, Nilai APBD), sehingga persamaan regresi :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + e_{it}$$

Keterangan :

Y = pertumbuhan ekonomi

β_0 = koefisien intersep

β_1 = koefisien pengaruh aset

β_2 = koefisien pengaruh pembiayaan

β_3 = koefisien pengaruh DPK

β_4 = koefisien pengaruh kredit

β_5 = koefisien pengaruh APBD

i = 33 provinsi di Indonesia

t = waktu (2007 – 2016)

e_{it} = variabel pengganggu

Pemilihan model estimasi

3.3.2. Pemilihan Model Estimasi

Di dalam mengestimasi model regresi data panel digunakan beberapa metode dengan tiga pendekatan yaitu :

1. *Common Effect Models*

Dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu.

$$Y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + u_{it}$$

2. *Fixed Effect Models*

Model yang mengasumsikan adanya intersep di dalam persamaan, bahwa intersep berbeda antar perusahaan sedangkan slope-nya tetap sama.

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta X_{it} + u_{it}$$

3. *Random Effect Models*

Di dalam model ini kita akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu, dengan di asumsikan variabel random mean α_0 , sehingga intersep dapat di asumsikan sebagai $\alpha_1 = \alpha_i + e_i$, dimana e_i merupakan error random dimana mempunyai mean 0 dari varians e_i tidak secara langsung di observasi atau disebut juga variabel lain.

Penentuan model terbaik antara *Common Effect Models*, *Fixed Effect Models*, *Random Effect Models* menggunakan dua uji estimasi yaitu sebagai berikut :

1. Uji *Chow Test*

Merupakan pengujian untuk menentukan antara model *Common Effect* atau *Fixed Effect* yang tepat digunakan dalam mengestimasi data panel dengan hipotesis :

$H_0 = \text{Common Effect Models}$

$H_a = \text{Fixed Effect Models}$

- Jika $F\text{-hitung} >$ dari nilai $F\text{-tabel}$ maka H_0 ditolak, dengan demikian berarti menerima H_a maka model yang paling tepat digunakan yaitu *Fixed Effect Models*.
- Jika $F\text{-hitung} <$ dari nilai $F\text{-tabel}$ maka H_0 diterima, dengan demikian berarti gagal menerima H_a maka model yang paling tepat digunakan yaitu *Common Effect Models*

2. Uji *Hausman Test*

Merupakan pengujian untuk menentukan antara model *Common Effect* atau *Fixed Effect* yang tepat digunakan dalam mengestimasi data panel dengan hipotesis :

$H_0 = \text{Common Effect Models}$

$H_a = \text{Fixed Effect Models}$

- Jika $F\text{-hitung} >$ dari nilai $F\text{-tabel}$ maka H_0 ditolak, dengan demikian berarti menerima H_a maka model yang paling tepat digunakan yaitu *Fixed Effect Models*.

- Jika $F_{hitung} <$ dari nilai F_{tabel} maka H_0 diterima, dengan demikian berarti gagal menerima H_a maka model yang paling tepat digunakan yaitu *Common Effect Models*.

3.3.3. Uji Statistik

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merupakan seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikat, sebuah garis regresi adalah baik jika nilai R^2 tinggi dan sebaliknya bila R^2 adalah rendah maka mempunyai garis regresi yang kurang baik.

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji signifikansi simultan merupakan uji pengaruh semua variabel independen secara serempak terhadap variabel dependen.

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$$

Artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

$$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$$

Artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Maka uji F dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$F_{hitung} = \frac{R^2 / (k-1)}{(1-R^2) / (n-k)}$$

Keterangan :

R = Koefisien determinasi

n = Jumlah observasi

k = Jumlah parameter estimasi termasuk intersep

Membuat hipotesis :

- Jika F hitung $>$ F kritis, maka menolak H_0
- Jika F hitung $<$ F kritis, maka menerima H_0

3. Uji Signifikansi Variabel Independen (Uji t)

Uji statistik distribusi t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara individual. Pengambilan keputusan pengaruh masing – masing variabel independen secara individu adalah dengan derajat keyakinan tertentu maka :

- Jika nilai t hitung $>$ t kritis maka H_0 ditolak atau menerima H_a
- Jika nilai t hitung $<$ t kritis maka H_0 diterima atau menolak H_a

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

4.1. Analisis Deskripsi Data

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam penelitian ini, data yang digunakan berupa data panel yang merupakan gabungan antara data silang (*cross section*) dengan data runtut waktu (*time series*) pada awalnya diperkenalkan oleh Howles sekitar tahun 1950. Variabel yang digunakan yaitu variabel independen yang terdiri dari total aset, total pembiayaan, dana pihak ketiga (DPK), kredit konvensional, nilai APBD. Sedangkan variabel dependennya yaitu pertumbuhan ekonomi yang diwujudkan dalam bentuk PDRB (ADHK) di Indonesia (miliar). Analisis penelitian ini menggunakan analisis statistik/ekonometrika dengan alat bantu yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini berupa alat bantu komputer melalui program *Eviews 8*. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan.

4.2. Deskripsi Objek Penelitian

4.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2013) pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang

dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor – faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan jumlah dan kualitasnya.

Tabel 4.1
Pertumbuhan Ekonomi PDRB (ADHK) di Indonesia tahun 2007-2011
(miliar)

PROVINSI	TAHUN				
	2007	2008	2009	2010	2011
Aceh	35983.09	34097.99	32219.09	101545.24	108217.63
Sumatera Utara	99792.27	106172.36	111559.22	331085.24	377037.1
Sumatera Barat	32912.97	35176.63	36683.24	105017.74	118674.29
Sumatera Selatan	55262.11	58065.46	60452.94	194012.97	226666.93
Bangka Belitung	9464.54	9899.93	10270.11	35561.9	40849.04
Jambi	14275.16	15297.77	16274.91	90618.41	103522.91
Bengkulu	7037.40	7441.87	7859.92	28352.57	32199.71
Riau	86213.26	91085.38	93786.24	388578.23	485649.34
Kepulauan Riau	34713.81	37014.74	38318.83	111223.67	126914.2
Lampung	32694.89	34443.15	36256.30	150560.84	170046.79
DKI Jakarta	332971.25	353723.39	371469.50	1075183.48	1224218.48
Jawa Barat	274180.31	291205.84	303405.25	906685.76	1021628.6
Banten	75349.61	79700.68	83453.73	271465.28	306174.29
Jawa Tengah	159110.25	168034.48	176673.46	623224.62	692561.63
DI Yogyakarta	18291.51	19212.48	20064.26	64678.97	71369.96
Jawa Timur	288404.31	305538.69	320861.17	990648.84	1120577.16
Bali	24449.89	25910.33	27290.95	93749.35	104612.19
Kalimantan Barat	26019.74	27438.79	28756.88	86065.85	96727.13
Kalimantan Tengah	15754.51	16726.46	17657.79	56531.02	65871.41
Kalimantan Timur	98386.38	103206.87	105564.94	418211.58	515191.48
Kalimantan Selatan	25922.29	27593.09	29051.63	85305	98780.55
Sulawesi Utara	14344.30	15902.07	17149.62	51721.33	57343.6
Gorontalo	2339.22	2520.67	2710.74	15475.74	17406.53
Sulawesi Barat	3567.82	3998.50	4239.46	17183.83	20189.34
Sulawesi Tengah	13961.15	15047.43	16207.60	51752.07	60716.29
Sulawesi Tenggara	9331.72	10010.59	10768.58	48401.15	55758.55
Sulawesi Selatan	41332.43	44549.82	47326.08	171740.74	198289.08
Maluku	3633.48	3787.27	3993.14	18428.58	21367.86

Sumber : *Badan Pusat Statistik (BPS) 2018*

Tabel 4.1 (Lanjutan)
Pertumbuhan Ekonomi PDRB (ADHK) di Indonesia tahun 2007-2011
(miliar)

PROVINSI	TAHUN				
	2007	2008	2009	2010	2011
Maluku Utara	2501.18	2651.11	2812.04	14983.91	17078.14
NTB	16369.22	16831.60	18874.40	70122.73	68176.69
NTT	10902.40	11429.77	11920.60	43846.61	48815.24
Irian Jaya Barat	5934.32	6399.53	7286.98	41361.67	44254.64
Papua	19200.30	18931.84	23138.44	110808.18	108188.76

Sumber : *Badan Pusat Statistik (BPS) 2018*

Tabel 4.1. Menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi di 33 Provinsi di Indonesia selama periode 2007 – 2011. Wilayah dengan tingkat PDRB terbesar yaitu DKI Jakarta selama periode 2007 – 2011. Sedangkan wilayah dengan PDRB terendah adalah wilayah Gorontalo.

Tabel 4.2
Pertumbuhan Ekonomi PDRB (ADHK) di Indonesia tahun 2012-2016
(miliar)

PROVINSI	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
Aceh	114552.08	121331.13	127897.07	128980.13	137277.42
Sumatera Utara	417120.44	469464.02	521954.95	571722.01	628394.16
Sumatera Barat	131435.65	146899.83	164944.26	179404.74	195682.53
Sumatera Selatan	253265.12	280348.46	306421.6	332892.66	355419.17
Bangka Belitung	45400.23	50388.36	56373.62	60992.09	65125.29
Jambi	115070.4	129976.04	144814.42	155106.24	171711.45
Bengkulu	36207.68	40565.49	45389.9	50336.99	55402.51
Riau	558492.72	607498.45	679395.86	652138.44	682351.09
Kepulauan Riau	144840.79	163261.57	180879.98	199538.59	216579.9
Lampung	187348.82	204402.64	230794.45	253225.19	281113.14
DKI Jakarta	1369432.64	1546876.49	1762316.4	1989329.54	2177119.88

Sumber : *Badan Pusat Statistik (BPS) 2018*

Tabel 4.2(Lanjutan)
Pertumbuhan Ekonomi PDRB (ADHK) di Indonesia tahun 2012-2016
(miliar)

PROPINSI	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
Jawa Barat	1128245.68	1258989.33	1385825.08	1524832.2	1652589.44
Banten	338224.93	377836.08	428740.07	478543.97	516326.9
Jawa Tengah	754529.44	830016.02	922471.18	1011850.97	1092030.92
DI Yogyakarta	77247.86	84924.54	92842.48	101447.65	110098.34
Jawa Timur	1248767.29	1382501.5	1537947.63	1692903	1855042.7
Bali	117987.4	134407.53	156395.73	177156.34	195376.31
Kalimantan Barat	106958.8	118640.96	132345.29	146702.78	161491.92
Kalimantan Tengah	73425.38	81956.92	89889.88	100217.67	112441.2
Kalimantan Timur	550735.76	519131.87	527515.26	503691.11	507073.76
Kalimantan Selatan	106725.43	115858.2	127882.28	137392.5	146325.62
Sulawesi Utara	63875.31	71097.46	80667.63	91280.2	100537.36
Gorontalo	19669.72	22129.28	25193.78	28536.15	31823.65
Sulawesi Barat	22626.21	25249.49	29458.25	33017.33	35974.49
Sulawesi Tengah	69637.92	79842.22	90246.27	107599.13	120232.87
Sulawesi Tenggara	64693.98	71041.25	78622.15	87765.98	96982.96
Sulawesi Selatan	228285.47	258836.42	298033.8	340326.42	379209.48
Maluku	24661.75	27834.44	31656.48	34344.12	37062.64
Maluku Utara	19340.46	21439.49	24042.08	26640.79	29165.23
NTB	69022.23	73618.88	81620.73	103865.28	116246.73
NTT	54893.15	61325.26	68500.43	76190.85	84172.64
Irian Jaya Barat	47421.09	52997.66	58180.96	62889.89	66635.51
Papua	112812.56	122857.17	133329.98	151201.5	178370.34

Sumber : *Badan Pusat Statistik (BPS) 2018*

Tabel 4.2. Menunjukkan tingkat PDRB tertinggi di 33 Provinsi di Indonesia selama periode 2012 – 2016. Wilayah dengan persentase tingkat PDRB terbesar yaitu DKI Jakarta selama periode 2012 – 2016. Sedangkan wilayah dengan tingkat PDRB terendah adalah wilayah Kalimantan Tengah selama periode 2012-2016.

4.2.2. Total Aset

Menurut Faud (2016) aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh perbankan/pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lain dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh perbankan, pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non – keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber – sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Tabel 4.3

Total Aset Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2007 – 2011 (Miliar)

PROVINSI	TAHUN				
	2007	2008	2009	2010	2011
Aceh	550	903	1003	2784	3573
Sumatera Utara	1700	3211	3521	5176	7664
Sumatera Barat	7556	8566	3566	2556	4349
Sumatera Selatan	4156	6250	5000	2619	4164
Bangka Belitung	196	206	296	198	417
Jambi	1920	1772	2072	744	1252
Bengkulu	356	453	345	323	493
Riau	8200	5276	5176	3200	4493
Kepulauan Riau	1963	1132	932	1007	1977
Lampung	2500	3021	1121	1125	1782
DKI Jakarta	200060	201103	191133	79429	121418
Jawa Barat	40252	41161	31061	14252	20176
Banten	4331	6441	6341	4048	6410
Jawa Tengah	7180	9160	9180	6152	9007
DI Yogyakarta	2681	3570	3371	2373	3066
Jawa Timur	22506	23666	23006	8224	13151

Sumber : *Statistik Perbankan Syariah (OJK) 2018*

Tabel 4.3 (Lanjutan)**Total Aset Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2007 – 2011 (Miliar)**

PROVINSI	TAHUN				
	2007	2008	2009	2010	2011
Bali	203	213	211	325	575
Kalimantan Barat	3661	3861	3661	1350	1718
Kalimantan Tengah	981	994	981	174	330
Kalimantan Timur	3068	3452	2502	2833	3714
Kalimantan Selatan	3284	3314	2484	2691	3572
Sulawesi Utara	726	776	676	305	483
Gorontalo	205	521	205	179	253
Sulawesi Barat	420	396	396	60	150
Sulawesi Tengah	768	524	686	437	830
Sulawesi Tenggara	259	349	259	306	501
Sulawesi Selatan	5434	6434	6434	1977	3842
Maluku	83	96	86	93	158
Maluku Utara	198	100	121	144	213
NTB	220	550	650	729	1121
NTT	626	446	546	81	168
Irian Jaya Barat	88	71	121	104	159
Papua	461	596	963	366	558

Sumber : *Statistik Perbankan Syariah (OJK) 2018*

Tabel 4.3. Menunjukkan nilai total aset perbankan syariah di 33 provinsi di Indonesia selama periode 2007 – 2011. Wilayah dengan total aset tertinggi yaitu DKI Jakarta selama periode 2007 – 2011. Hal tersebut disebabkan karena aktiva lancar dan aktiva tetap daerah DKI Jakarta lebih besar dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Indonesia.

Tabel 4.4**Total Aset Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2012 – 2016 (Miliar)**

PROPINSI	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
Aceh	4271	4676	5500	5048	5586
Sumatera Utara	10049	10887	11510	9468	11525
Sumatera Barat	5672	7194	7858	6421	4087
Sumatera Selatan	5192	6141	6474	6370	5797
Bangka Belitung	594	735	276	306	317
Jambi	1892	2228	2208	1970	2538
Bengkulu	646	859	963	900	1005
Riau	6313	7469	7814	7021	7967
Kepulauan Riau	2348	2834	2853	2578	2975
Lampung	2429	2979	3088	2500	2615
DKI Jakarta	151196	191174	236825	201397	231978
Jawa Barat	28187	33198	41906	36568	41409
Banten	7715	8313	8101	7276	8265
Jawa Tengah	12354	16254	19425	16035	19975
DI Yogyakarta	3533	4584	5309	3924	4538
Jawa Timur	19047	25198	29683	24195	28629
Bali	910	3134	1548	1602	1747
Kalimantan Barat	2478	3161	3487	3491	4072
Kalimantan Tengah	546	803	814	823	938
Kalimantan Timur	4724	6883	6281	5629	5914
Kalimantan Selatan	4825	6174	6937	4240	4523
Sulawesi Utara	560	568	515	480	431
Gorontalo	298	375	369	352	314
Sulawesi Barat	210	264	237	201	209
Sulawesi Tengah	949	1087	1080	1018	1198
Sulawesi Tenggara	1021	1000	954	1239	944
Sulawesi Selatan	5349	6770	7409	6278	6926
Maluku	471	326	312	406	465
Maluku Utara	279	354	384	375	390
NTB	1656	2345	3257	2228	2414
NTT	461	377	275	513	209
Irian Jaya Barat	230	321	339	276	342
Papua	714	924	780	1020	1003

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (OJK) 2018

Tabel 4.4. Menunjukkan nilai total aset perbankan syariah di 33 provinsi di Indonesia selama periode 2012 – 2016. Wilayah dengan total aset tertinggi yaitu DKI Jakarta selama periode 2007 – 2011. Untuk provinsi riau total aset dari tahun 2012 – 2016 terus mengalami kenaikan. Sedangkan untuk total aset terendah tahun 2012 – 2016 dialami oleh Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Timur.

4.2.3. Total Pembiayaan

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014) mendefinisikan pembiayaan pada dasarnya merupakan sebuah kesepakatan bank dengan nasabah yang memerlukan dana untuk membiayai kegiatan atau aktivitas tertentu. Kesepakatan penyaluran pembiayaan bank kepada nasabah tersebut dapat dibedakan berdasarkan akad yang digunakan. Akad pembiayaan bisa berupa akad jual beli, akad penanaman modal atau investasi, akad sewa – menyewa, dan akad lain – lain. Ada pula akad pinjam – meminjam uang tanpa tambahan atas pokok atau bunga. Pengenaan tambahan pengembalian berupa bunga pada pokok pinjaman terjadi pada kredit konvensional.

Tabel 4.5
Total Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2007 – 2011
(Miliar)

PROPINSI	TAHUN				
	2007	2008	2009	2010	2011
Aceh	279	538	849	1617	2338
Sumatera Utara	1668	2369	2840	3497	4936
Sumatera Barat	398	602	833	1469	2476
Sumatera Selatan	509	761	1052	1566	2272
Bangka Belitung	39	41	37	135	286
Jambi	145	275	411	712	1194
Bengkulu	175	201	235	311	421
Riau	696	893	1047	1589	2323

Sumber : *Statistik Perbankan Syariah (OJK) 2018*

Tabel 4.5 (Lanjutan)**Total Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2007 – 2011
(Miliar)**

PROPINSI	TAHUN				
	2007	2008	2009	2010	2011
Kepulauan Riau	297	337	401	852	1380
Lampung	235	368	515	922	1501
DKI Jakarta	12959	18172	21158	26900	38981
Jawa Barat	3065	3766	4666	8029	11945
Banten	962	841	1111	2086	3707
Jawa Tengah	1240	1958	2611	4170	6503
DI Yogyakarta	318	508	629	868	1451
Jawa Timur	1774	2566	3519	5627	9075
Bali	44	73	115	298	545
Kalimantan Barat	364	476	588	720	1080
Kalimantan Tengah	21	25	37	106	196
Kalimantan Timur	575	706	1048	1590	2193
Kalimantan Selatan	570	795	847	1156	1477
Sulawesi Utara	73	114	145	240	356
Gorontalo	71	63	86	168	221
Sulawesi Barat	3	5	7	53	131
Sulawesi Tengah	98	136	163	390	642
Sulawesi Tenggara	161	180	157	187	310
Sulawesi Selatan	858	978	1098	1672	2844
Maluku	14	16	13	28	54
Maluku Utara	33	36	35	87	123
NTB	200	261	396	556	895
NTT	15	24	33	75	156
Irian Jaya Barat	35	42	62	89	114
Papua	53	77	140	272	348

Sumber : *Statistik Perbankan Syariah (OJK) 2018*

Tabel 4.5. Menunjukkan nilai pembiayaan di 33 provinsi di Indonesia selama periode 2007 – 2011. Wilayah dengan nilai pembiayaan tertinggi yaitu DKI Jakarta selama periode 2007 – 2011.

Tabel 4.6
Total Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2012 – 2016
(Miliar)

PROPINSI	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
Aceh	2707	2971	3048	3095	3009
Sumatera Utara	7105	7760	7589	7287	8692
Sumatera Barat	3292	3744	3582	3599	3673
Sumatera Selatan	3430	4026	4199	4090	4185
Bangka Belitung	440	592	252	282	299
Jambi	1699	2051	1977	1882	2154
Bengkulu	547	766	824	808	884
Riau	3002	3409	3436	3406	3983
Kepulauan Riau	1834	2149	2351	2438	2744
Lampung	2000	2360	2169	2113	2227
DKI Jakarta	60026	75399	81942	85410	93139
Jawa Barat	16990	20217	25603	26417	28273
Banten	4698	5803	5791	5882	5925
Jawa Tengah	8529	10668	11777	11712	14208
DI Yogyakarta	1701	2103	2549	2536	2858
Jawa Timur	12755	16089	18892	19218	20779
Bali	864	2537	1479	1491	1574
Kalimantan Barat	1740	2456	2555	2879	3257
Kalimantan Tengah	409	620	665	682	768
Kalimantan Timur	2823	4587	4126	4077	4292
Kalimantan Selatan	2029	2710	2811	2955	3180
Sulawesi Utara	473	522	490	460	422
Gorontalo	284	346	348	339	297
Sulawesi Barat	200	245	232	192	164
Sulawesi Tengah	847	961	955	933	969
Sulawesi Tenggara	473	724	853	846	835
Sulawesi Selatan	3978	4893	5160	5370	5744
Maluku	80	102	102	101	97
Maluku Utara	152	199	202	197	189
NTB	1293	1632	1894	1894	2078
NTT	229	292	256	247	199
Irian Jaya Barat	140	200	185	160	154
Papua	504	605	586	547	538

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (OJK) 2018

Tabel 4.6. Menunjukkan nilai pembiayaan di 33 provinsi di Indonesia selama periode 2012 – 2016. Wilayah dengan nilai pembiayaan tertinggi yaitu DKI Jakarta selama periode 2012 – 2016. Hal tersebut dikarenakan pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan dan penyaluran pembiayaan kepada pihak ketiga berdasarkan lapangan usaha dan bukan lapangan usaha bank umum dan unit usaha syariah di DKI Jakarta termasuk paling tertinggi diantara provinsi yang lain. Untuk wilayah – wilayah lainnya cenderung konstan dan hanya sedikit wilayah yang nilai pembiayaan tiap tahun mengalami peningkatan, sedangkan nilai pembiayaan terendah dialami oleh Maluku pada periode 2012 – 2016.

4.2.4. Dana Pihak Ketiga

Menurut Hasyim (2016) dana pihak ketiga berdasarkan Pasal 1 No. 20 Undang – undang No. 21 Tahun 2008, dana pihak ketiga merupakan dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam dunia perbankan, dana pihak ketiga terdiri dari simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*), dan simpanan deposito (*time deposit*).

Tabel 4.7
Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2007 –
2011 (Miliar)

PROPINSI	TAHUN				
	2007	2008	2009	2010	2011
Aceh	1341	1064	1215	1382	2016
Sumatera Utara	1021	3941	4458	2800	4550
Sumatera Barat	1374	1349	1728	1288	1762
Sumatera Selatan	467	583	1119	1454	2558
Bangka Belitung	284	288	169	126	333
Jambi	321	469	843	381	627
Bengkulu	382	143	167	195	284
Riau	1155	1760	1892	1534	2327
Kepulauan Riau	1387	1241	1088	593	1250
Lampung	1289	1159	1036	663	930
DKI Jakarta	71466	10083	95417	34889	54571
Jawa Barat	119504	135580	154212	9328	12833
Banten	2310	3011	2903	3007	4680
Jawa Tengah	70139	80782	91223	3391	5003
DI Yogyakarta	1323	1034	1179	1229	1669
Jawa Timur	13778	11426	13720	5749	9317
Bali	322	324	322	254	395
Kalimantan Barat	1465	1570	1995	717	1066
Kalimantan Tengah	530	209	108	115	261
Kalimantan Timur	4316	1518	1319	1895	2625
Kalimantan Selatan	987	1026	1164	1211	1676
Sulawesi Utara	133	141	182	125	189
Gorontalo	141	133	109	140	206
Sulawesi Barat	76	51	40	34	59
Sulawesi Tengah	271	221	201	285	405
Sulawesi Tenggara	177	263	207	248	354
Sulawesi Selatan	1094	1113	1127	1159	1661
Maluku	113	171	101	71	120
Maluku Utara	206	190	173	110	175
NTB	402	363	301	420	643
NTT	96	85	91	60	134
Irian Jaya Barat	45	64	83	97	141
Papua	276	127	344	239	396

Sumber : *Statistik Perbankan Syariah (OJK) 2018*

Tabel 4.7 (Lanjutan)

**Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2012 –
2016 (Miliar)**

PROPINSI	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
Aceh	2103	2676	3429	3059	3636
Sumatera Utara	5536	6089	7273	6824	8958
Sumatera Barat	2068	2367	2491	2598	2798
Sumatera Selatan	3051	3266	3751	4604	4050
Bangka Belitung	511	520	185	179	200
Jambi	848	891	991	984	1067
Bengkulu	384	446	485	461	544
Riau	3432	3683	3471	3454	3913
Kepulauan Riau	1495	1931	1529	1488	1503
Lampung	1270	1577	1757	1719	1835
DKI Jakarta	68421	86718	111153	110509	123954
Jawa Barat	17462	19083	23366	23235	27371
Banten	5537	5483	5444	5544	6434
Jawa Tengah	6558	8750	10674	10576	12082
DI Yogyakarta	2257	2864	3215	3330	3876
Jawa Timur	12495	16912	19043	17624	18963
Bali	563	2459	756	769	785
Kalimantan Barat	1315	1598	1700	1868	1798
Kalimantan Tengah	424	583	616	612	624
Kalimantan Timur	3159	4369	4116	3909	4333
Kalimantan Selatan	2243	2711	2965	2851	3108
Sulawesi Utara	266	231	211	193	202
Gorontalo	225	288	213	239	214
Sulawesi Barat	86	131	160	118	164
Sulawesi Tengah	567	651	676	633	776
Sulawesi Tenggara	465	598	602	557	598
Sulawesi Selatan	2068	2892	3039	3081	3660
Maluku	214	242	295	295	323
Maluku Utara	222	287	320	334	354
NTB	845	956	1136	1067	1187
NTT	155	153	148	104	104
Irian Jaya Barat	204	270	295	236	283
Papua	576	572	674	526	575

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (OJK) 2018

Tabel 4.7. Menunjukkan nilai dana pihak ketiga (DPK) di 33 provinsi di Indonesia selama periode 2007 – 2016. Wilayah dengan nilai DPK tertinggi yaitu DKI Jakarta selama periode 2007 – 2016. Hal tersebut dikarenakan bank umum syariah memperoleh dana dari masyarakat dan bank dapat menggunakan 3 jenis simpanan yaitu Giro syariah, Tabungan syariah dan Deposito syariah. Untuk provinsi Jawa Timur nilai Dana Pihak Ketiga tiap tahunnya mengalami trend positif, yaitu selalu mengalami kenaikan sampai akhir tahun 2016. Provinsi Lampung juga demikian, dilihat dari tabel Dana Pihak Ketiga selalu mengalami peningkatan dari tahun 2012 ke 2013 dan begitu terus meningkat sampai pada akhir tahun 2016. Pada periode tahun 2012 – 2016 Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah terendah pada provinsi Nusa Tenggara Timur, ini disebabkan kurangnya informasi masyarakat terhadap perbankan syariah.

4.2.5. Kredit Konvensional

Menurut Kasmir (2014) kredit dalam arti luas sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam bahasa latin kredit berarti *credere* artinya percaya. Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah dia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan kembali sesuai dengan penyerahan barang di belakang, dan qard (pinjaman), serta kombinasi dari akad – akad tersebut. Menurut Undang – Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Tabel 4.8**Kredit Bank Umum Konvensional di Indonesia tahun 2007 – 2011 (Miliar)**

PROPINSI	TAHUN				
	2007	2008	2009	2010	2011
Aceh	6606	9334	12496	16171	18714
Sumatera Utara	53439	65643	72315	87117	106073
Sumatera Barat	11247	13553	15787	20052	24573
Sumatera Selatan	13566	17524	21987	27553	35249
Bangka Belitung	8136	10605	11890	14494	4993
Jambi	5641	7593	9117	11641	15104
Bengkulu	2956	4232	4747	5751	7399
Riau	15787	20304	24186	29326	36387
Kepulauan Riau	1474	2359	2658	3737	18147
Lampung	11657	14737	16089	19018	23782
DKI Jakarta	507496	67487	709804	86413	1080426
Jawa Barat	77007	97419	113367	139218	172550
Banten	20754	28254	31399	41465	52115
Jawa Tengah	56736	72972	82752	99042	120950
DI Yogyakarta	7843	9138	10162	12174	15154
Jawa Timur	9227	115892	128479	155238	190058
Bali	12592	16298	19498	24321	29793
Kalimantan Barat	6830	9182	11461	15287	19433
Kalimantan Tengah	3293	4319	5689	8838	11491
Kalimantan Timur	15731	20474	24976	32513	41908
Kalimantan Selatan	9020	11803	13745	17180	21006
Sulawesi Utara	6650	9048	10630	13037	16121
Gorontalo	998	1693	1711	2171	4433
Sulawesi Barat	1515	2065	2670	3638	2782
Sulawesi Tengah	4600	5936	7255	9109	11125
Sulawesi Tenggara	2783	3788	4725	6095	8153
Sulawesi Selatan	21478	27205	32760	41658	53068
Maluku	1427	2168	2980	3989	4926
Maluku Utara	837	1246	1665	2243	3017
NTB	4747	5976	7272	9511	12122
NTT	4202	5404	6663	7877	10184
Irian Jaya Barat	1196	1786	2398	3043	3914
Papua	3536	4905	6352	8412	11013

Sumber : *Statistik Perbankan Indonesia (OJK) 2018*

Tabel 4.8 (Lanjutan)**Kredit Bank Umum Konvensional di Indonesia tahun 2012 – 2016 (Miliar)**

PROPINSI	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
Aceh	20755	23538	25221	27219	29949
Sumatera Utara	130886	155203	166025	178387	187937
Sumatera Barat	30384	34323	37682	41309	44436
Sumatera Selatan	44204	53339	60193	64873	70848
Bangka Belitung	5467	7813	8767	9397	10578
Jambi	19282	23615	26225	28729	30651
Bengkulu	9361	11277	12601	14345	15891
Riau	43303	48573	52114	56425	58333
Kepulauan Riau	23059	28180	29785	31980	33712
Lampung	30146	35422	38488	41410	44526
DKI Jakarta	1310522	1604953	1782027	1981495	2117143
Jawa Barat	219544	267666	304196	333595	364038
Banten	64337	76353	89177	97056	112602
Jawa Tengah	150269	175439	196929	215788	235966
DI Yogyakarta	18636	22166	25734	27162	29938
Jawa Timur	239702	302809	342988	374106	399479
Bali	38418	47875	55483	60973	67033
Kalimantan Barat	24728	30303	34790	38257	44472
Kalimantan Tengah	14281	16748	17356	17990	19618
Kalimantan Timur	52316	64093	65898	67023	67602
Kalimantan Selatan	26634	31584	34920	39640	43057
Sulawesi Utara	19768	23299	25997	29529	31420
Gorontalo	5522	6735	8184	9040	9717
Sulawesi Barat	3366	3870	4280	4598	5684
Sulawesi Tengah	13523	16408	18806	20702	23044
Sulawesi Tenggara	10602	12963	14186	16090	18262
Sulawesi Selatan	66433	75625	83568	95041	103891
Maluku	5576	6545	7072	7707	8521
Maluku Utara	3847	4631	5067	5685	6405
NTB	15323	18383	21242	23977	31392
NTT	12525	14917	17094	19488	21913
Irian Jaya Barat	5398	6731	7616	8123	9685
Papua	14439	17763	20431	22187	24279

Sumber : *Statistik Perbankan Indonesia (OJK) 2018*

Tabel 4.8. Menunjukkan nilai kredit bank konvensional di 33 provinsi di Indonesia selama periode 2007 – 2016. Wilayah dengan nilai kredit bank konvensional tertinggi yaitu DKI Jakarta selama periode 2007 – 2016. Hal tersebut dikarenakan kredit berdasarkan penyalurannya kepada pihak ketiga berdasarkan lapangan usaha dan bukan lapangan usaha bank umum dan unit usaha bank. DKI Jakarta termasuk paling tinggi diantara provinsi lainnya. Untuk wilayah lainnya juga mengalami peningkatan akan tetapi tidak terlalu signifikan dan relatif kecil, dan tidak setiap tahunnya juga mengalami peningkatan. Wilayah yang nilai kreditnya terendah adalah provinsi Sulawesi Barat pada periode 2007 – 2016. Hal ini dikarenakan tingkat kemiskinan yang tinggi sehingga tidak mampu membayar kredit, selain itu juga disebabkan kecilnya inovasi atas usaha yang dikembangkan.

4.2.6. Nilai APBD

Menurut Koto (2012) APBD merupakan instrumen utama untuk melaksanakan kebijakan dalam satu tahun anggaran. Perbedaan substansial antara era sebelum otonomi dengan era otonomi daerah, bahwa sebelumnya dominasi eksekutif sangat besar dan hampir menafsirkan peran DPRD dan masyarakat dalam menyusun APBD, berubah kepada penyusunan anggaran yang harus mengedepankan partisipasi dan akuntabilitas publik. Dengan demikian penyusunan harus melibatkan masyarakat secara aktif. Untuk itu perlu dibuat regulasi antara ketiga pihak agar hak dan kewajibannya jelas maka harus mencerminkan suatu kesatuan sistem perencanaan yang sistematis dan dapat dianalisis dengan dokumen – dokumen perencanaan yang ditetapkan sebelumnya.

Tabel 4.9
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Indonesia tahun 2007
– 2011 (Miliar)

PROPINSI	TAHUN				
	2007	2008	2009	2010	2011
Aceh	6759485282	10053496967	10057848068	7638450905	8917046
Sumatera Utara	2975150652	3620112147	3823149652	3893354496	5363367
Sumatera Barat	1500992185	1981806904	2340270447	2397052997	2406382
Sumatera Selatan	2473117006	2675473262	2686370175	3253627048	4354300
Bangka Belitung	900066417	1094814862	1120391013	1133197336	1433930
Jambi	1465875749	1795869258	1740202069	1504934650	2432067
Bengkulu	869010532	1528368652	1133060449	1146076792	1206661
Riau	4482462584	4630963040	4102988966	4111760597	5861961
Kepulauan Riau	1464840644	1540890058	1850953213	1830000000	2251884
Lampung	1724721428	1903356381	1926059226	1849829137	2689173
DKI Jakarta	18688643178	20586014202	23698266946	24672060000	33223439
Jawa Barat	6964665374	8625321490	10243086750	9560556638	13503603
Banten	2065997712	2500484635	2673816449	2534767119	4291462
Jawa Tengah	4794746491	6051713397	6380477669	6195132959	8786746
DI Yogyakarta	1517570986	1795670310	1571892164	1433589952	1859143
Jawa Timur	6855217883	8799027458	9888941344	10799057101	13058159
Bali	1546287055	1949845742	2370335993	2129051051	3366462
Kalimantan Barat	1327096037	1608529296	1800044633	1695910981	2433951
Kalimantan Tengah	1186481862	1452390075	1513335718	1694125280	2054045
Kalimantan Timur	7583071884	8488741122	7356134996	7001683554	11469538
Kalimantan Selatan	1586696549	2145463517	2658830563	2224662000	3472922
Sulawesi Utara	842693748	1351136380	1422453456	1395545265	1474979
Gorontalo	595531171	665305933	684462657	598217887	794420
Sulawesi Barat	395301921	581008353	614124505	610416487	744623
Sulawesi Tengah	818141796	1150485182	1241844212	1112303812	1631299
Sulawesi Tenggara	772061059	1019452467	1155185334	1332877089	1487713
Sulawesi Selatan	2075749997	2342294334	2359456231	2444737251	3401082
Maluku	954521115	848750828	1073409828	979071816	1193672
Maluku Utara	566566506	702766404	766878094	832840209	952524
NTB	928340293	1137789836	1237434737	1382121206	1706631
NTT	1224207631	1256404418	1291681545	1231130166	1444705
Irian Jaya Barat	884256991	1696275178	2871598049	2776189768	4053068
Papua	6433759440	5757078135	6237822338	5284525558	7183484

Sumber : Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi (BPS) 2018

Tabel 4.9 (Lanjutan)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Indonesia tahun 2012
– 2016 (Miliar)

PROPINSI	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
Aceh	10688984	12640526	13368028	12611106	12653241
Sumatera Utara	7922705	7412094	8526301	8495657	10976895
Sumatera Barat	3283832	3424590	3722297	4326354	4876172
Sumatera Selatan	5701060	5989475	7417566	6030394	6627642
Bangka Belitung	1627061	1814133	2015859	2212653	2287560
Jambi	3287095	3577072	3265329	3604245	3381885
Bengkulu	1759865	1937726	1909177	2436204	2491651
Riau	8753995	8972959	8276751	10892856	10075133
Kepulauan Riau	2764150	3358007	3495000	2649778	2852614
Lampung	3859694	3925662	4324705	4898783	5691235
DKI Jakarta	41854732	48981265	51418296	53419020	59392458
Jawa Barat	19881315	22172242	25897425	28561853	31344462
Banten	5788550	6681044	8138238	9236215	9786470
Jawa Tengah	12402216	14649375	16846898	18517591	20050498
DI Yogyakarta	2465343	2986257	3529399	3911108	4270073
Jawa Timur	16902515	19126278	22619271	24678649	26527236
Bali	4420446	5008581	4709667	5873708	5923695
Kalimantan Barat	3316215	3484572	3829897	4207748	4503518
Kalimantan Tengah	2965637	3368430	3276407	3546929	3587855
Kalimantan Timur	14724195	14830601	13930000	9376313	8212409
Kalimantan Selatan	5315565	5554736	5356326	5500274	5600689
Sulawesi Utara	2024022	2314997	2477619	2818668	2985770
Gorontalo	997139	1153659	1304658	1476327	1652704
Sulawesi Barat	978030	1175240	1307240	1473750	1814445
Sulawesi Tengah	2171610	2280724	2447184	3037418	3253130
Sulawesi Tenggara	1835575	2176240	2236255	2886690	3260316
Sulawesi Selatan	4646301	5017396	5890378	6415560	7292544
Maluku	1514750	1694903	1926719	2304537	2831652
Maluku Utara	1396447	1441124	1649653	1856130	2061128
NTB	2260531	2407729	2874205	3647334	4148660
NTT	2430253	2639015	2818931	3570228	4040760
Irian Jaya Barat	4271507	6010272	5920196	7506270	7257003
Papua	8241636	9129555	11315078	12986632	13071335

Sumber : Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi (BPS) 2018

Tabel 4.8. Menunjukkan nilai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di 33 provinsi di Indonesia selama periode 2007 – 2016. Wilayah dengan nilai APBD tertinggi yaitu DKI Jakarta selama periode 2007 – 2016. Hal tersebut dikarenakan anggaran pada sektor pembangunan besar dan adanya sisipan beberapa porsi untuk belanja pegawai dalam pembiayaan program untuk publik. Diikuti oleh wilayah Jawa Barat nilai APBD tidak jauh beda dibawah wilayah DKI Jakarta. Sedangkan nilai APBD terendah dialami oleh wilayah Gorontalo dan Sulawesi Barat.

4.3. Hasil Model Estimasi Data Panel

4.3.1. Uji Chow Test

Pengujian yang dilakukan menggunakan uji *Chow* bertujuan untuk memilih model yang terbaik antara *common effect model* dengan *fixed effect model* dengan berdasarkan hipotesis sebagai berikut :

Ho : memilih menggunakan model estimasi *Common Effect*.

Ha : memilih menggunakan model estimasi *Fixed effect*.

Untuk melakukan pemilihan antara *common effect* atau *fixed effect* dapat dilakukan dengan melihat *p-value* signifikan (kurang dari $\alpha = 5\%$) maka model yang digunakan adalah estimasi *fixed effect*, begitu juga sebaliknya jika *p-value* tidak signifikan (lebih besar dari $\alpha = 5\%$) maka model yang digunakan adalah estimasi *common effect*.

Tabel 4.10
Hasil Regresi Uji Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests
Pool: FIXED_EFFECT
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	16.075069	(32,292)	0.0000
Cross-section Chi-square	335.223518	32	0.0000

Sumber : *evIEWS 8*

Pada tabel di atas hasil regresi dengan menggunakan *evIEWS 8* maka didapatkan nilai hasil probabilitas Chi-square = 0.0000, yang berarti probabilitas = $0.0000 < \alpha = 5\%$, sehingga model yang digunakan adalah model estimasi *fixed effect*.

4.3.2. Uji Hausman Test

Uji yang digunakan untuk memilih model yang terbaik antara *random effect model* dan *fixed effect model* dengan berdasarkan hipotesis sebagai berikut :

Ho : memilih menggunakan model estimasi *Random effect*.

Ha : memilih menggunakan model estimasi *Fixed effect*.

Untuk melakukan pemilihan antara model *random effect* atau *fixed effect* dapat dilakukan dengan melihat *p-value* signifikan (kurang dari $\alpha = 5\%$) maka model yang digunakan adalah estimasi *fixed effect*, begitu juga sebaliknya jika *p-value* tidak signifikan (lebih besar dari $\alpha = 5\%$) maka model yang digunakan adalah estimasi *random effect*.

Tabel 4.11
Hasil Regresi Uji Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: FIXED_EFFECT
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	26.638048	5	0.0001

Sumber : *evIEWS 8*

Pada tabel di atas hasil regresi dengan menggunakan *evIEWS 8* maka didapatkan nilai hasil probabilitas Chi-square = 0.0001, yang berarti probabilitas = $0.0001 < \alpha = 5\%$, sehingga model yang digunakan adalah model estimasi *fixed effect*.

4.3.3. Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Tabel 4.12
Hasil Regresi Fixed Effect Model

Dependent Variable: LOG(Y?)
Method: Pooled Least Squares
Date: 08/13/18 Time: 16:05
Sample: 2007 2016
Included observations: 10
Cross-sections included: 33
Total pool (balanced) observations: 330

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.973194	0.676672	10.30513	0.0000
LOG(X1?)	-0.144414	0.044837	-3.220858	0.0014
LOG(X2?)	0.540587	0.043330	12.47617	0.0000
LOG(X3?)	-0.069505	0.041508	-1.674481	0.0951
LOG(X4?)	0.328568	0.050157	6.550732	0.0000
LOG(X5?)	-0.053319	0.011613	-4.591286	0.0000
Fixed Effects (Cross)				
_ACEH--C	-0.179634			
_SUMATERA_UTARA--C	0.071686			
_SUMATERA_BARAT--C	-0.191336			

Sumber : *evIEWS 8*

Tabel 4.12 (Lanjutan)
Hasil Regresi Fixed Effect Model

_SUMATERA_SELATAN--C	0.228272
_BANGKA_BELITUNG--C	-0.257212
_JAMBI--C	-0.239297
_BENKULU--C	-0.882159
_RIAU--C	0.955609
_KEPULAUAN_RIAU--C	0.254218
_LAMPUNG--C	0.157295
_DKI_JAKARTA--C	0.240082
_JAWA_BARAT--C	0.816111
_BANTEN--C	0.335736
_JAWA_TENGAH--C	0.678414
_DI_YOGYAKARTA--C	-0.464736
_JAWA_TIMUR--C	1.012790
_BALI--C	-0.054318
_KALIMANTAN_BARAT--C	-0.234381
_KALIMANTAN_TENGAH--C	0.285090
_KALIMANTAN_TIMUR--C	0.837213
_KALIMANTAN_SELATAN--C	-0.343979
_SULAWESI_UTARA--C	-0.287346
_GORONTALO--C	-1.093911
_SULAWESI_BARAT--C	-0.248642
_SULAWESI_TENGAH--C	-0.266024
_SULAWESI_TENGGARA--C	-0.325075
_SULAWESI_SELATAN--C	-0.142895
_MALUKU--C	-0.150569
_MALUKU_UTARA--C	-0.687888
_NTB--C	-0.480724
_NTT--C	0.080799
_IRIAN_JAYA_BARAT--C	0.084900
_PAPUA--C	0.491911

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.960576	Mean dependent var	11.34651
Adjusted R-squared	0.955581	S.D. dependent var	1.443352
S.E. of regression	0.304198	Akaike info criterion	0.565688
Sum squared resid	27.02063	Schwarz criterion	1.003160
Log likelihood	-55.33856	Hannan-Quinn criter.	0.740189
F-statistic	192.2904	Durbin-Watson stat	1.630577
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : *eviews 8*

$$Y = 6.973194 - 0.144414\text{Log}X_1 + 0.540587\text{Log}X_2 - 0.069505\text{Log}X_3 + 0.328568\text{Log}X_4 - 0.053319\text{Log}X_5 + e$$

Keterangan :

Y = pertumbuhan ekonomi PDRB (ADHK)

β_0 = koefisien intersep

β_1 = koefisien pengaruh X1 (Aset)

β_2 = koefisien pengaruh X2 (Pembiayaan)

β_3 = koefisien pengaruh X3 (DPK)

β_4 = koefisien pengaruh X4 (Kredit)

β_5 = koefisien pengaruh X5 (APBD)

4.3.4. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merupakan seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikat. Dari hasil regresi pengaruh Aset, Pembiayaan, DPK, Kredit, APBD terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia tahun 2007 – 2016 dengan estimasi *fixed effect*, diperoleh nilai R^2 sebesar 0.960576 atau sebesar 96%. Hal ini membuktikan bahwa variasi variabel Aset, Pembiayaan, DPK, Kredit, APBD dapat dijelaskan oleh variabel tersebut. Sedangkan sisanya sebesar 4% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

4.3.5. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama – sama mempengaruhi variabel dependen atau tidak berpengaruh. Dari hasil regresi didapatkan nilai probabilitas sebesar $0.000000 < \alpha = 5\%$, artinya signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama – sama mempengaruhi variabel dependen.

4.3.6. Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji t)

Tabel 4.13

Hasil Regresi Pengujian Hipotesis

Variabel	t -Statistik	Prob.	Keterangan
X1	-3.220858	0.0014	Signifikan
X2	12.47617	0.0000	Signifikan
X3	-1.674481	0.0951	Tidak signifikan
X4	6.550732	0.0000	Signifikan
X5	-4.591286	0.0000	Signifikan

Sumber : *eviews 8*

Berdasarkan uji *Fixed effect* yang telah dilakukan dapat kita simpulkan bahwa :

1. X1 (Aset)

Dari hasil uji signifikansi didapatkan probabilitas $0.0014 < \alpha = 5\%$ berarti signifikan dan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jumlah aset mempunyai koefisien sebesar -0.144414 serta berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2007 – 2016. Artinya ketika jumlah aset perbankan syariah bertambah 1%

maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebesar - 0.144414%.

2. X2 (Pembiayaan)

Dari hasil uji signifikansi didapatkan probabilitas $0.0000 < \alpha = 5\%$ berarti signifikan dan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jumlah pembiayaan mempunyai koefisien sebesar 0.540587 serta berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2007 – 2016. Artinya ketika jumlah pembiayaan perbankan syariah bertambah 1% maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebesar 0.540587%.

3. X3 (DPK)

Dari hasil uji signifikansi didapatkan probabilitas $0.0951 > \alpha = 5\%$ berarti tidak signifikan dan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

4. X4 (Kredit konvensional)

Dari hasil uji signifikansi didapatkan probabilitas $0.0000 < \alpha = 5\%$ berarti signifikan dan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jumlah kredit konvensional mempunyai koefisien sebesar 0.328568 serta berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2007 – 2016. Artinya ketika jumlah kredit konvensional bertambah 1% maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebesar 0.328568%.

5. X5 (APBD)

Dari hasil uji signifikansi didapatkan probabilitas $0.0000 < \alpha = 5\%$ berarti signifikan dan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jumlah nilai APBD mempunyai koefisien sebesar -0.053319 serta berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2007 – 2016. Artinya ketika jumlah nilai APBD bertambah 1% maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebesar - 0.053319%.

4.3.7. Persamaan Estimasi dengan Intersep Pembeda *Cross Effect*

Persamaan estimasi dengan mempertimbangkan *cross effect* dapat dilakukan dengan menjumlahkan konstanta pada persamaan hasil estimasi dengan hasil estimasi koefisien *cross effect*. *Cross effect* diperoleh berdasarkan estimasi yang mengikuti jumlah individu dalam penelitian, maka sesungguhnya koefisien tersebut akan dimiliki oleh masing – masing unit atau individu. (Sriyana, 2014)

Tabel 4.14

Nilai Crossid Provinsi

Crossid	Effect
Aceh	-0.179634
Sumatera utara	0.071686
Sumatera barat	-0.191336
Sumatera selatan	0.228272
Bangka belitung	-0.257212
Jambi	-0.239297
Bengkulu	-0.882159
Riau	0.955609
Kepulauan riau	0.254218
Lampung	0.157295
DKI Jakarta	0.240082
Jawa barat	0.816111
Banten	0.335736
Jawa tengah	0.678414
DI Yogyakarta	-0.464736
Jawa timur	1.012790
Bali	-0.054318
Kalimantan barat	-0.234381
Kalimantan tengah	0.285090
Kalimantan timur	0.837213
Kalimantan selatan	-0.343979
Sulawesi utara	-0.287346

Sumber : *eviews 8*

Tabel 4.14 (Lanjutan)

Nilai Crossid Provinsi

Crossid	Effect
Gorontalo	-1.093911
Sulawesi barat	-0.248642
Sulawesi tengah	-0.266024
Sulawesi tenggara	-0.325075
Sulawesi selatan	-0.142895
Maluku	-0.150569
Maluku utara	-0.687888
NTB	-0.480724
NTT	0.080799
Irian jaya barat	0.084900
Papua	0.491911

Sumber : *evIEWS 8*

Tabel 4.14. Menunjukkan nilai crossid dari masing – masing provinsi di Indonesia.

Persamaan regresi :

Aceh

$$Y_{it} = 6.973194 - 0.179634 - 0.144414\text{Log}X1_{it} + 0.540587\text{Log}X2_{it} - 0.069505\text{Log}X3_{it} + 0.328568\text{Log}X4_{it} - 0.053319\text{Log}X5_{it} + e_{it} = 6.79356$$

Sumatera utara

$$Y_{it} = 6.973194 + 0.071686 - 0.144414\text{Log}X1_{it} + 0.540587\text{Log}X2_{it} - 0.069505\text{Log}X3_{it} + 0.328568\text{Log}X4_{it} - 0.053319\text{Log}X5_{it} + e_{it} = 7.04488$$

Sumatera barat

$$Y_{it} = 6.973194 - 0.191336 - 0.144414\text{Log}X1_{it} + 0.540587\text{Log}X2_{it} - 0.069505\text{Log}X3_{it} + 0.328568\text{Log}X4_{it} - 0.053319\text{Log}X5_{it} + e_{it} = 6.781858$$

Sumatera selatan

$$Y_{it} = 6.973194 + 0.228272 - 0.144414\text{LogX1}_{it} + 0.540587\text{LogX2}_{it} - 0.069505\text{LogX3}_{it} + 0.328568\text{LogX4}_{it} - 0.053319\text{LogX5}_{it} + e_{it} = 7.201466$$

Bangka belitung

$$Y_{it} = 6.973194 - 0.257212 - 0.144414\text{LogX1}_{it} + 0.540587\text{LogX2}_{it} - 0.069505\text{LogX3}_{it} + 0.328568\text{LogX4}_{it} - 0.053319\text{LogX5}_{it} + e_{it} = 6.715982$$

Jambi

$$Y_{it} = 6.973194 - 0.239297 - 0.144414\text{LogX1}_{it} + 0.540587\text{LogX2}_{it} - 0.069505\text{LogX3}_{it} + 0.328568\text{LogX4}_{it} - 0.053319\text{LogX5}_{it} + e_{it} = 6.733897$$

Bengkulu

$$Y_{it} = 6.973194 - 0.882159 - 0.144414\text{LogX1}_{it} + 0.540587\text{LogX2}_{it} - 0.069505\text{LogX3}_{it} + 0.328568\text{LogX4}_{it} - 0.053319\text{LogX5}_{it} + e_{it} = 6.091035$$

Riau

$$Y_{it} = 6.973194 + 0.955609 - 0.144414\text{LogX1}_{it} + 0.540587\text{LogX2}_{it} - 0.069505\text{LogX3}_{it} + 0.328568\text{LogX4}_{it} - 0.053319\text{LogX5}_{it} + e_{it} = 7.928803$$

Kepulauan Riau

$$Y_{it} = 6.973194 + 0.254218 - 0.144414\text{LogX1}_{it} + 0.540587\text{LogX2}_{it} - 0.069505\text{LogX3}_{it} + 0.328568\text{LogX4}_{it} - 0.053319\text{LogX5}_{it} + e_{it} = 7.227412$$

Lampung

$$Y_{it} = 6.973194 + 0.157295 - 0.144414\text{LogX1}_{it} + 0.540587\text{LogX2}_{it} - 0.069505\text{LogX3}_{it} + 0.328568\text{LogX4}_{it} - 0.053319\text{LogX5}_{it} + e_{it} = 7.130489$$

DKI Jakarta

$$Y_{it} = 6.973194 + 0.240082 - 0.144414\text{LogX1}_{it} + 0.540587\text{LogX2}_{it} - 0.069505\text{LogX3}_{it} + 0.328568\text{LogX4}_{it} - 0.053319\text{LogX5}_{it} + e_{it} = 7.213276$$

Jawa Barat

$$Y_{it} = 6.973194 + 0.816111 - 0.144414\text{LogX1}_{it} + 0.540587\text{LogX2}_{it} - 0.069505\text{LogX3}_{it} + 0.328568\text{LogX4}_{it} - 0.053319\text{LogX5}_{it} + e_{it} = 7.789305$$

Banten

$$Y_{it} = 6.973194 + 0.335736 - 0.144414\text{LogX1}_{it} + 0.540587\text{LogX2}_{it} - 0.069505\text{LogX3}_{it} + 0.328568\text{LogX4}_{it} - 0.053319\text{LogX5}_{it} + e_{it} = 7.30893$$

Jawa Tengah

$$Y_{it} = 6.973194 + 0.678414 - 0.144414\text{LogX1}_{it} + 0.540587\text{LogX2}_{it} - 0.069505\text{LogX3}_{it} + 0.328568\text{LogX4}_{it} - 0.053319\text{LogX5}_{it} + e_{it} = 7.651608$$

DIYogyakarta

$$Y_{it} = 6.973194 - 0.464736 - 0.144414\text{LogX1}_{it} + 0.540587\text{LogX2}_{it} - 0.069505\text{LogX3}_{it} + 0.328568\text{LogX4}_{it} - 0.053319\text{LogX5}_{it} + e_{it} = 6.508458$$

Jawa Timur

$$Y_{it} = 6.973194 + 1.012790 - 0.144414\text{LogX1}_{it} + 0.540587\text{LogX2}_{it} - 0.069505\text{LogX3}_{it} + 0.328568\text{LogX4}_{it} - 0.053319\text{LogX5}_{it} + e_{it} = 7.985984$$

Bali

$$Y_{it} = 6.973194 - 0.054318 - 0.144414\text{LogX1}_{it} + 0.540587\text{LogX2}_{it} - 0.069505\text{LogX3}_{it} + 0.328568\text{LogX4}_{it} - 0.053319\text{LogX5}_{it} + e_{it} = 6.918876$$

Kalimantan Barat

$$Y_{it} = 6.973194 - 0.234381 - 0.144414\text{LogX1}_{it} + 0.540587\text{LogX2}_{it} - 0.069505\text{LogX3}_{it} + 0.328568\text{LogX4}_{it} - 0.053319\text{LogX5}_{it} + e_{it} = 6.738813$$

Kalimantan Tengah

$$Y_{it} = 6.973194 + 0.285090 - 0.144414\text{LogX1}_{it} + 0.540587\text{LogX2}_{it} - 0.069505\text{LogX3}_{it} + 0.328568\text{LogX4}_{it} - 0.053319\text{LogX5}_{it} + e_{it} = 7.258284$$

Kalimantan Timur

$$Y_{it} = 6.973194 + 0.837213 - 0.144414\text{LogX1}_{it} + 0.540587\text{LogX2}_{it} - 0.069505\text{LogX3}_{it} + 0.328568\text{LogX4}_{it} - 0.053319\text{LogX5}_{it} + e_{it} = 7.810407$$

Kalimantan Selatan

$$Y_{it} = 6.973194 - 0.343979 - 0.144414\text{LogX1}_{it} + 0.540587\text{LogX2}_{it} - 0.069505\text{LogX3}_{it} + 0.328568\text{LogX4}_{it} - 0.053319\text{LogX5}_{it} + e_{it} = 6.629215$$

Sulawesi Utara

$$Y_{it} = 6.973194 - 0.287346 - 0.144414\text{Log}X1_{it} + 0.540587\text{Log}X2_{it} - 0.069505\text{Log}X3_{it} + 0.328568\text{Log}X4_{it} - 0.053319\text{Log}X5_{it} + e_{it} = 6.685848$$

Gorontalo

$$Y_{it} = 6.973194 - 1.093911 - 0.144414\text{Log}X1_{it} + 0.540587\text{Log}X2_{it} - 0.069505\text{Log}X3_{it} + 0.328568\text{Log}X4_{it} - 0.053319\text{Log}X5_{it} + e_{it} = 5.879283$$

Sulawesi Barat

$$Y_{it} = 6.973194 - 0.248642 - 0.144414\text{Log}X1_{it} + 0.540587\text{Log}X2_{it} - 0.069505\text{Log}X3_{it} + 0.328568\text{Log}X4_{it} - 0.053319\text{Log}X5_{it} + e_{it} = 6.724552$$

Sulawesi Tengah

$$Y_{it} = 6.973194 - 0.266024 - 0.144414\text{Log}X1_{it} + 0.540587\text{Log}X2_{it} - 0.069505\text{Log}X3_{it} + 0.328568\text{Log}X4_{it} - 0.053319\text{Log}X5_{it} + e_{it} = 6.70717$$

Sulawesi Tenggara

$$Y_{it} = 6.973194 - 0.325075 - 0.144414\text{Log}X1_{it} + 0.540587\text{Log}X2_{it} - 0.069505\text{Log}X3_{it} + 0.328568\text{Log}X4_{it} - 0.053319\text{Log}X5_{it} + e_{it} = 6.648119$$

Sulawesi Selatan

$$Y_{it} = 6.973194 - 0.142895 - 0.144414\text{Log}X1_{it} + 0.540587\text{Log}X2_{it} - 0.069505\text{Log}X3_{it} + 0.328568\text{Log}X4_{it} - 0.053319\text{Log}X5_{it} + e_{it} = 6.830299$$

Maluku

$$Y_{it} = 6.973194 - 0.150569 - 0.144414\text{LogX1}_{it} + 0.540587\text{LogX2}_{it} - 0.069505\text{LogX3}_{it} + 0.328568\text{LogX4}_{it} - 0.053319\text{LogX5}_{it} + e_{it} = 6.822625$$

Maluku Utara

$$Y_{it} = 6.973194 - 0.687888 - 0.144414\text{LogX1}_{it} + 0.540587\text{LogX2}_{it} - 0.069505\text{LogX3}_{it} + 0.328568\text{LogX4}_{it} - 0.053319\text{LogX5}_{it} + e_{it} = 6.285306$$

NTB

$$Y_{it} = 6.973194 - 0.480724 - 0.144414\text{LogX1}_{it} + 0.540587\text{LogX2}_{it} - 0.069505\text{LogX3}_{it} + 0.328568\text{LogX4}_{it} - 0.053319\text{LogX5}_{it} + e_{it} = 6.49247$$

NTT

$$Y_{it} = 6.973194 + 0.080799 - 0.144414\text{LogX1}_{it} + 0.540587\text{LogX2}_{it} - 0.069505\text{LogX3}_{it} + 0.328568\text{LogX4}_{it} - 0.053319\text{LogX5}_{it} + e_{it} = 7.053993$$

Irian Jaya Barat

$$Y_{it} = 6.973194 + 0.084900 - 0.144414\text{LogX1}_{it} + 0.540587\text{LogX2}_{it} - 0.069505\text{LogX3}_{it} + 0.328568\text{LogX4}_{it} - 0.053319\text{LogX5}_{it} + e_{it} = 7.058094$$

Papua

$$Y_{it} = 6.973194 + 0.491911 - 0.144414\text{LogX1}_{it} + 0.540587\text{LogX2}_{it} - 0.069505\text{LogX3}_{it} + 0.328568\text{LogX4}_{it} - 0.053319\text{LogX5} + e_{it} = 7.465105$$

Dari hasil tersebut dapat terlihat besarnya pengaruh perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di setiap provinsi di Indonesia. Untuk Provinsi Aceh tingkat pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 6.79356, Provinsi

Sumatera Utara tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 7.04488, Provinsi Sumatera Barat tingkat pertumbuhan ekonomi 6.781858, Provinsi Sumatera Selatan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 7.201466, Provinsi Bangka Belitung sebesar 6.715982, Provinsi Jambi tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 6.733897, Provinsi Bengkulu pertumbuhan ekonomi sebesar 6.091035, Provinsi Riau sebesar 7.928803, Provinsi Kepulauan Riau pertumbuhan ekonomi sebesar 7.227412, Provinsi Lampung pertumbuhan ekonomi sebesar 7.130489, Provinsi DKI Jakarta sebesar 7.213276, Provinsi Jawa Barat pertumbuhan ekonomi sebesar 7.789305, Provinsi Banten sebesar 7.30893, Provinsi Jawa Tengah sebesar 7.651608, Provinsi DI Yogyakarta pertumbuhan ekonomi sebesar 6.508458, Provinsi Jawa Timur pertumbuhan ekonomi sebesar 7.985984, Provinsi Bali pertumbuhan ekonomi sebesar 6.918876, Provinsi Kalimantan Barat sebesar 6.738813, Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 7.258284, Provinsi Kalimantan Timur pertumbuhan ekonomi sebesar 7.810407, Provinsi Kalimantan selatan sebesar 6.629215, Provinsi Sulawesi Utara pertumbuhan ekonomi sebesar 6.685848, Provinsi Gorontalo pertumbuhan ekonomi sebesar 5.879283, Provinsi Sulawesi Barat pertumbuhan ekonomi sebesar 6.724552, Provinsi Sulawesi Tengah pertumbuhan ekonomi sebesar 6.70717, Provinsi Sulawesi Tenggara pertumbuhan ekonomi sebesar 6.648119, Provinsi Sulawesi Selatan pertumbuhan ekonomi sebesar 6.830299, Provinsi Maluku pertumbuhan ekonomi sebesar 6.822625, Provinsi Maluku Utara pertumbuhan ekonomi sebesar 6.285306, Provinsi Nusa Tenggara Barat pertumbuhan ekonomi sebesar 6.49247, Provinsi Nusa Tenggara Timur pertumbuhan ekonomi sebesar 7.053993, Provinsi Irian

Jaya Barat pertumbuhan ekonomi sebesar 7.058094, Provinsi Papua pertumbuhan ekonomi sebesar 7.465105.

Dari hasil tersebut menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi paling rendah yaitu Provinsi Gorontalo dengan nilai 5.879283, sedangkan untuk tingkat pertumbuhan ekonomi paling tinggi yaitu Provinsi Jawa Timur sebesar 7.985984.

4.4. Analisis Ekonomi

4.4.1. Analisis Pengaruh Total Aset Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Dari hasil pengolahan data diketahui bahwa variabel total aset signifikan akan tetapi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, hal ini disebabkan karena total aset perbankan syariah yang ada masih banyak digunakan untuk keperluan perbankan syariah seperti ekspansi perbankan atau meningkatkan kualitas selain itu jumlah total aset perbankan syariah yang relatif masih kecil jika dibandingkan dengan total aset bank konvensional sehingga aset perbankan syariah tidak terlalu berpengaruh untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

4.4.2. Analisis Pengaruh Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Dari hasil pengolahan data diketahui bahwa variabel pembiayaan signifikan dan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, hal ini dikarenakan dengan adanya penyaluran pembiayaan perbankan syariah dapat membantu masyarakat yang mengalami defisit dana selain itu bank juga mendapat imbalan dari penyaluran pembiayaan berupa margin, bagi hasil ataupun

ujrah. Semakin besar pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah menyebabkan kenaikan pada pertumbuhan ekonomi. Hal sesuai dengan teori Schumpeter yang berkesinambungan dengan teori fungsi produksi, yang menunjukkan bahwa sektor keuangan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada perbankan syariah pertumbuhan ekonomi faktor pendorong terhadap pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui fungsi intermediasi bank yang menyalurkan dana hasil himpunan dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Kemudian dana itu disalurkan oleh perbankan syariah melalui sektor – sektor ekonomi yang ada di masyarakat seperti pembiayaan untuk modal kerja, pembiayaan untuk investasi dan pembiayaan untuk konsumsi.

4.4.3. Analisis Pengaruh DPK Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Dari hasil pengolahan data diketahui bahwa variabel DPK tidak signifikan dan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, hal ini dikarenakan total DPK bank syariah yang masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan bank konvensional. Selain itu minat masyarakat untuk mendorong dalam menginvestasikan dananya melalui bank syariah itu relatif masih sedikit, perlu disadari bahwa masyarakat harus lebih dulu percaya bahwa bank syariah mampu merealisasikan tujuan – tujuan investasinya. Belum adanya kepercayaan ini membuat banyak masyarakat menahan diri untuk berinvestasi melalui bank syariah. Dan juga kurang terserapnya dana di perbankan syariah yang digunakan para investor sebagai modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

4.4.4. Analisis Pengaruh Kredit Bank Konvensional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Dari hasil pengolahan data diketahui bahwa variabel kredit bank konvensional signifikan dan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, hal ini dikarenakan dalam sektor finansial memainkan peran penting bagi pertumbuhan ekonomi. Semakin banyaknya layanan perbankan yang ditawarkan oleh perbankan akan membuat masyarakat lebih terdorong untuk menyimpan uangnya di bank dan menyebabkan dana yang terhimpun di perbankan menjadi lebih besar sehingga memungkinkan perbankan menyalurkan kredit yang lebih besar bagi sektor riil maupun modal kerja. Dengan meningkatnya jumlah kredit yang disalurkan maka pihak yang menerima kredit akan mampu meningkatkan akumulasi modal dan inovasi teknologi dalam proses produksi sehingga secara umum akan meningkatkan produktivitas perusahaan, jika produktivitas meningkat maka jumlah output yang dapat diproduksi akan bertambah dan pertumbuhan ekonomi akan naik.

4.4.5. Analisis Pengaruh Nilai APBD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Dari hasil pengolahan data diketahui bahwa variabel nilai APBD signifikan tetapi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini dikarenakan nilai APBD yang defisit yang disebabkan pengurangan dana alokasi umum sehingga menyebabkan penurunan PAD yang akan menghalangi pembangunan di suatu daerah sehingga akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi, selain itu juga dikarenakan semakin tinggi ratio belanja terhadap PDRB

akan mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi, serta belum mampunya pemerintah untuk menetapkan skala prioritas pembangunan daerah secara optimal atas sektor – sektor pembangunan.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2007 – 2016 dapat disimpulkan bahwa :

1. Variabel total aset perbankan syariah signifikan akan tetapi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, karena total aset perbankan syariah yang ada masih banyak digunakan untuk keperluan perbankan syariah seperti ekspansi perbankan atau meningkatkan kualitas selain itu jumlah total aset perbankan syariah yang relatif masih kecil jika dibandingkan dengan total aset bank konvensional sehingga aset perbankan syariah tidak terlalu berpengaruh untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
2. Variabel pembiayaan perbankan syariah signifikan dan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, karena dengan adanya pembiayaan dari perbankan syariah sangat membantu masyarakat yang mengalami defisit dana sehingga masyarakat mempunyai modal untuk berinvestasi dan dengan adanya pembiayaan ikut membantu pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi karena semakin besar pembiayaan maka pertumbuhan ekonomi akan berjalan dengan baik.
3. Variabel DPK perbankan syariah tidak signifikan dan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, hal ini disebabkan karena DPK perbankan syariah masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan

perbankan konvensional selain itu minat masyarakat untuk menginvestasikan dananya di perbankan syariah relatif masih sedikit sehingga belum terlalu berkontribusi banyak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan perbankan konvensional.

4. Variabel kredit perbankan konvensional signifikan dan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, hal ini karena banyaknya layanan perbankan yang ditawarkan kepada masyarakat sehingga masyarakat ingin menyimpan dananya di bank dan menyebabkan dana yang terhimpun di bank menjadi lebih besar sehingga perbankan dapat menyalurkan kredit dengan nilai yang lebih besar, dengan semakin meningkatnya jumlah kredit yang disalurkan maka pihak yang menerima kredit akan mampu meningkatkan akumulasi modal dan inovasi teknologi dalam proses produksi sehingga secara umum akan meningkatkan produktivitas perusahaan, jika produktivitas meningkat maka jumlah output yang dapat diproduksi akan bertambah dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan naik.
5. Variabel APBD signifikan akan tetapi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, hal ini disebabkan dikarenakan nilai APBD yang defisit yang disebabkan pengurangan dana alokasi umum sehingga menyebabkan penurunan PAD yang akan menghalangi pembangunan disuatu daerah sehingga akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi dan tingginya rasio belanja daerah juga akan berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Selain itu juga belum mempunya pemerintah untuk menetapkan skala prioritas pembangunan daerah secara optimal atas sektor – sektor pembangunan.

5.2. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2007 – 2016 terdapat beberapa implikasi yaitu :

1. Variabel total aset perbankan syariah signifikan akan tetapi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Harus ada strategi yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah di Indonesia khususnya untuk meningkatkan pangsa pasar yang relatif masih kecil dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya, memperkuat regulasi, serta dengan mengadaptasi perkembangan teknologi yang semakin canggih.
2. Variabel pembiayaan perbankan syariah signifikan dan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Perbankan syariah harus meningkatkan dan mengembangkan pembiayaan dengan skema bagi hasil (*mudharabah*) karena skema ini sudah lebih banyak dikenal dan terbukti mampu untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan dapat mengawasi inflasi selain itu perbankan syariah harus lebih selektif dalam memilih nasabah pembiayaan dan ikut dalam mengawasi usaha pengelolaan dana oleh sebab itu pembiayaan perbankan syariah harus

mendapat perhatian khusus karena pembiayaan merupakan pembiayaan bank penuh pada usaha ataupun proyek nasabah.

3. Variabel DPK perbankan syariah tidak signifikan dan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Harus adanya strategi yang dilakukan perbankan syariah dalam meningkatkan DPK salah satu perbankan syariah melakukan ekspansi perluasan jaringan kantor cabang sehingga dengan banyaknya kantor cabang maka pengenalan masyarakat terhadap perbankan syariah itu menjadi lebih mudah dan akan meningkatkan pangsa pasar selain itu juga memberikan program promo yang akan berdampak pada tabungan yang bertujuan akhir pada peningkatan DPK.
4. Variabel kredit perbankan konvensional signifikan dan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk kedepannya perbankan konvensional selalu menjaga kelancaran kredit untuk mencegah kredit bermasalah yang dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi nasional menjadi menurun selain itu perbankan konvensional meningkatkan efektivitas penyaluran dana kredit. Dalam hal ini perbankan konvensional dalam menetapkan bunga dapat menggunakan *flat rate* maupun *floating rate* yang disarankan oleh BI rate.
5. Variabel APBD signifikan akan tetapi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Harusnya pemerintah memberikan regulasi yang kuat untuk APBD agar tidak terjadi penyelewengan dana APBD karena dana APBD sangat rawan. Selain itu pemerintah juga harus

mempertajam alokasi belanja untuk mendukung pembangunan infrastruktur, penciptaan kesempatan kerja, dan pengentasan kemiskinan, dan juga penghematan terhadap kegiatan yang kurang produktif seperti biaya perjalanan dinas, kegiatan rapat kerja, serta penerapan sistem *reward* dan *punishment* dalam pengalokasian anggaran yang bertujuan akhir untuk mencapai kesejahteraan rakyat adanya upaya peningkatan APBD melalui optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi. Selain itu, adapun retribusi yang belum optimal antara lain retribusi tempat penitipan anak, retribusi pengelolaan limbah cair. Disamping itu peningkatan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan perlu dilakukan dengan pelayanan satu atap (*one stop service*), perlu memperhatikan produk-produk unggulan daerah masing-masing atau sektor-sektor yang menghasilkan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi sehingga pelaksanaan desentralisasi fiskal yang berarti punya kewenangan dalam mengatur keuangan daerah dapat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriansyah, Yuli. (2009), “Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Kontribusinya Bagi Pembangunan Nasional” La Riba, Volume 3, No. 2, 181 – 196.
- Armein,Early. (2011), “Pengaruh Perbankan Syariah Yang Diwakili Oleh Aset, DPK, Pembiayaan Pada Pertumbuhan Perekonomian di Indonesia”Library.Gunadarma, Volume 1, No. 1, 1-15
- Badan Pusat Statistik, “Produk Domestik Regional Bruto (ADHK) 2000 – 2016”, www.bps.go.id.
- Badan Pusat Statistik, “Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2007 – 2010”, www.bps.go.id.
- Badan Pusat Statistik, “Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2011 – 2014”, www.bps.go.id.
- Badan Pusat Statistik, “Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2014 – 2017”, www.bps.go.id.
- Deviani. (2009), “Analisis Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendidikan” Pkbis Jurnal, Volume 8, No. 1, 1 – 13.
- El Ayyubi, Salahuddin., Anggraeni, Lukytawati., Mahiswari, Almira Dyah (2017), “Pengaruh Bank Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (The Effect of Islamic Banking to Economic Growth in Indonesia) Al-Muzara”ah, Volume 5, No. 2, 88 – 106.
- Faud, M. Ramli (2016), Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Fitriyah, Zulfita. (2010), “Pengaruh Kredit Perbankan Terhadap Pertumbuhan Industri Manufaktur Dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia” Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 8, No. 1, 209 – 214.
- Hasyim, Linda Tamim Umairoh. (2016), “Peran Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektor Riil Di Indonesia” Akrual, Volume 8, No. 1, 11 – 27.

- Hayati, Safaah Restuning. (2014), “Peran Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”, *Indo – Islamika*, Volume 4, No. 1, 41 – 66.
- Ikatan Bankir Indonesia (2018), *Memahami Bisnis Bank Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ibrahim, Zaini. (2015), “Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Perekonomian : Studi Kasus Perekonomian Banten” *Jurnal Islamiconomic*, Volume 6, No. 1, 103 – 127.
- Kasmir (2014), *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Ed. Revisi – cet.15*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Koto, Jolianis. (2012), “Analisis Perekonomian Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat” *Economic and Economic Education*, Volume 1 No.1, 32 – 43.
- Muliansyah, Predi. (2012), “Hubungan Dana Pihak Ketiga di Perbankan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”, Volume 1 No.1, 1 – 20.
- Otoritas Jasa Keuangan, “Perkembangan Pebankan Syariah Di Indonesia 2007 – 2016”, www.ojk.go.id.
- Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Indonesia 2007 – 2016”, www.ojk.go.id.
- Pujiati, Amin. (2008), “Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal” *Ejem*, Volume 13 No. 2, 1 – 17.
- Saputri, Ika Arum. (2016), “Pengaruh Dinamika Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2015” *Economics and Islamic Banking*, Volume 1 No. 1, 1 – 19.
- Sukirno, Sadono (2013), *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sriyana, Jaka (2014), *Metode Regresi Data Panel*, Ekonisia, Yogyakarta.
- Widarjono, Agus (2016), *Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

LAMPIRAN

Hasil Regresi Uji Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests
Pool: FIXED_EFFECT
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	16.075069	(32,292)	0.0000
Cross-section Chi-square	335.223518	32	0.0000

Hasil Regresi Uji Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: FIXED_EFFECT
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	26.638048	5	0.0001

Hasil Regresi Common Effect Model

Dependent Variable: LOG(Y?)
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 08/13/18 Time: 16:03
 Sample: 2007 2016
 Included observations: 10
 Cross-sections included: 33
 Total pool (balanced) observations: 330

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.230184	0.317966	13.30388	0.0000
LOG(X1?)	-0.147783	0.052122	-2.835310	0.0049
LOG(X2?)	0.409660	0.046933	8.728702	0.0000
LOG(X3?)	0.043836	0.049579	0.884176	0.3773
LOG(X4?)	0.568982	0.047952	11.86563	0.0000
LOG(X5?)	-0.026727	0.010534	-2.537286	0.0116
R-squared	0.891126	Mean dependent var		11.34651
Adjusted R-squared	0.889446	S.D. dependent var		1.443352
S.E. of regression	0.479910	Akaike info criterion		1.387578
Sum squared resid	74.62157	Schwarz criterion		1.456652
Log likelihood	-222.9503	Hannan-Quinn criter.		1.415130
F-statistic	530.3833	Durbin-Watson stat		0.709575
Prob(F-statistic)	0.000000			

Hasil Regresi Fixed Effect Model

Dependent Variable: LOG(Y?)
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 08/13/18 Time: 16:05
 Sample: 2007 2016
 Included observations: 10
 Cross-sections included: 33
 Total pool (balanced) observations: 330

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.973194	0.676672	10.30513	0.0000
LOG(X1?)	-0.144414	0.044837	-3.220858	0.0014
LOG(X2?)	0.540587	0.043330	12.47617	0.0000
LOG(X3?)	-0.069505	0.041508	-1.674481	0.0951
LOG(X4?)	0.328568	0.050157	6.550732	0.0000
LOG(X5?)	-0.053319	0.011613	-4.591286	0.0000
Fixed Effects (Cross)				
_ACEH--C	-0.179634			
_SUMATERA_UTARA--C	0.071686			
_SUMATERA_BARAT--C	-0.191336			
_SUMATERA_SELATAN--C	0.228272			
_BANGKA_BELITUNG--C	-0.257212			
_JAMBI--C	-0.239297			
_BENGKULU--C	-0.882159			
_RIAU--C	0.955609			
_KEPULAUAN_RIAU--C	0.254218			
_LAMPUNG--C	0.157295			
_DKI_JAKARTA--C	0.240082			
_JAWA_BARAT--C	0.816111			
_BANTEN--C	0.335736			
_JAWA_TENGAH--C	0.678414			
_DI_YOGYAKARTA--C	-0.464736			
_JAWA_TIMUR--C	1.012790			
_BALI--C	-0.054318			
_KALIMANTAN_BARAT--C	-0.234381			
_KALIMANTAN_TENGAH--C	0.285090			
_KALIMANTAN_TIMUR--C	0.837213			
_KALIMANTAN_SELATAN--C	-0.343979			
_SULAWESI_UTARA--C	-0.287346			
_GORONTALO--C	-1.093911			
_SULAWESI_BARAT--C	-0.248642			
_SULAWESI_TENGAH--C	-0.266024			
_SULAWESI_TENGGARA--C	-0.325075			
_SULAWESI_SELATAN--C	-0.142895			

-C	
_MALUKU--C	-0.150569
_MALUKU_UTARA--C	-0.687888
_NTB--C	-0.480724
_NTT--C	0.080799
_IRIAN_JAYA_BARAT--	
C	0.084900
_PAPUA--C	0.491911

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.960576	Mean dependent var	11.34651
Adjusted R-squared	0.955581	S.D. dependent var	1.443352
S.E. of regression	0.304198	Akaike info criterion	0.565688
Sum squared resid	27.02063	Schwarz criterion	1.003160
Log likelihood	-55.33856	Hannan-Quinn criter.	0.740189
F-statistic	192.2904	Durbin-Watson stat	1.630577
Prob(F-statistic)	0.000000		

Hasil Regresi Random Effect Model

Dependent Variable: LOG(Y?)
 Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 08/13/18 Time: 16:04
 Sample: 2007 2016
 Included observations: 10
 Cross-sections included: 33
 Total pool (balanced) observations: 330
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.436080	0.400654	13.56803	0.0000
LOG(X1?)	-0.109525	0.040146	-2.728147	0.0067
LOG(X2?)	0.551627	0.038473	14.33810	0.0000
LOG(X3?)	-0.035559	0.039163	-0.907984	0.3646
LOG(X4?)	0.389742	0.046525	8.377080	0.0000
LOG(X5?)	-0.033220	0.008293	-4.005883	0.0001
Random Effects (Cross)				
_ACEH--C	-0.213923			
_SUMATERA_UTARA--C	-0.141215			
_SUMATERA_BARAT--C	-0.244206			
_SUMATERA_SELATAN--C	0.112116			
_BANGKA_BELITUNG--C	-0.056856			
_JAMBI--C	-0.184126			
_BENGKULU--C	-0.659085			
_RIAU--C	0.758609			
_KEPULAUAN_RIAU--C	0.267563			
_LAMPUNG--C	0.120436			
_DKI_JAKARTA--C	-0.335191			
_JAWA_BARAT--C	0.371535			
_BANTEN--C	0.151492			
_JAWA_TENGAH--C	0.337303			
_DI_YOGYAKARTA--C	-0.450862			
_JAWA_TIMUR--C	0.604760			
_BALI--C	-0.017163			
_KALIMANTAN_BARAT--C	-0.237397			
_KALIMANTAN_TENGAH--C	0.390417			
_KALIMANTAN_TIMUR--C	0.641424			
_KALIMANTAN_SELATAN--C	-0.368756			
_SULAWESI_UTARA--C	-0.134635			
_GORONTALO--C	-0.756865			
_SULAWESI_BARAT--C	0.074870			
_SULAWESI_TENGAH--C	-0.139048			
_SULAWESI_TENGGARA--C	-0.156315			
_SULAWESI_SELATAN--C	-0.250524			

-C	
_MALUKU--C	0.119876
_MALUKU_UTARA--C	-0.364194
_NTB--C	-0.374033
_NTT--C	0.268641
_IRIAN_JAYA_BARAT--C	
C	0.324300
_PAPUA--C	0.541052

Effects Specification		
	S.D.	Rho
Cross-section random	0.317531	0.5214
Idiosyncratic random	0.304198	0.4786

Weighted Statistics			
R-squared	0.871223	Mean dependent var	3.289769
Adjusted R-squared	0.869236	S.D. dependent var	0.868860
S.E. of regression	0.314192	Sum squared resid	31.98411
F-statistic	438.3950	Durbin-Watson stat	1.386565
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.882550	Mean dependent var	11.34651
Sum squared resid	80.49972	Durbin-Watson stat	0.550909
